HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
29 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

RABU, 11 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

NASIONAL

Kepala Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Fight: Seolah-Olah Disayang Presiden

Oleh Redaksi · 11 Nov, 14.28 WIB



Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Syahganda menilai pernyataan Yusril lebih sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dia juga mengaitkan pandangannya dengan pertemuan bersama Prabowo beberapa waktu lalu.

"Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Santer Dikabarkan Mundur, Gibran Tinggalkan Istana Wapres!



BANDA ACEH - Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden di tengah penantian awak media yang sejak pagi menunggu kejelasan terkait kabar pengunduran dirinya.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Buka Lomba SJS DWP Aceh, Kak Na Imbau Kaum Bapak Stop Merokok



BANDA ACEH – Senam Jantung Sehat merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan jantung pribadi dan keluarga. Namun, upaya menjaga kesehatan jantung keluarga juga menuntut kerja sama kaum bapak, salah satunya adalah dengan stop merokok di rumah.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Marlina Usman …

Selengkapnya di halaman 20 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 20
LINGKUNGAN 25
Aneka Berita 27

SPORT

Rekomendasi Aplikasi Jadwal Bola Terbaik untuk Penggemar Sepak Bola



BANDA ACEH - Penggemar sepak bola bisa menggunakan aplikasi jadwal bola untuk mengetahui waktu pertandingan, memantau kompetisi favorit, hingga mendapatkan notifikasi ketika klub kesayangan akan bermain.

Beberapa aplikasi bahkan menyediakan skor langsung, statistik, klasemen, dan informasi susunan pemain.

Selengkapnya di halaman 27 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beda Nasib Wapres yang Mundur dan Dimakzulkan, Mulai dari Proses hingga Hak Pensiun



BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut.

Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

41 BERITA

NASIONAL

Kepala Bakom Bantah Prabowo Minta Gibran Fight: Seolah-Olah Disayang Presiden

Oleh Redaksi · 11 Nov, 14.28 WIB



Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Syahganda menilai pernyataan Yusril lebih sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Dia juga mengaitkan pandangannya dengan pertemuan bersama Prabowo beberapa waktu lalu.

"Nah, itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statementnya," imbuhnya.

Menurut Syahganda, dokumen penyetaraan pendidikan Gibran telah menghadapi putusan hukum di tingkat MK dan MA.

Karena itu, dia menilai tidak ada lagi ruang untuk menguji kembali materi maupun menimbulkan konsekuensi hukum baru melalui PTUN.

Dia menambahkan, pemerintah tetap menjaga fokus kerja kabinet di tengah polemik tersebut.

Penyelesaian persoalan hukum, kata dia, harus mengikuti jalur konstitusional tanpa mengganggu pelaksanaan program pemerintah.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra juga menilai upaya hukum lanjutan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tidak lagi memiliki dasar yuridis yang kuat.

Yusril menyoroti pertimbangan hukum dalam putusan MA yang menyebut adanya pelanggaran serius dan dampaknya terhadap kehidupan demokrasi.

"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tapi juga bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," ujar Yusril.

NASIONAL

Aktivis Semprot Gibran: Kalau Mau Mundur, Jangan Cek Ombak ke Prabowo!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 22.54 WIB

BANDA ACEH - Aktivis Nicho Silalahi mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai Gibran seharusnya tidak melakukan manuver Politik dengan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto jika memang sudah memiliki keputusan untuk meninggalkan jabatan.Pernyataan tersebut disampaikan Nicho melalui akun X miliknya, Selasa (10/11/2026). Dalam unggahannya, Nicho menyindir dugaan niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Prabowo.

Menurut Nicho, Gibran kemungkinan berharap Presiden Prabowo akan mencegah pengunduran dirinya sekaligus memberikan perlindungan politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan publik.

“Si Anak haram konstitusi Gibran berniat mundur dan menyampaikan kepada Presiden @prabowo. Mungkin dia berharap dalam hatinya untuk dicegah dan dilindungi, karena presiden memiliki hak prerogatif jadi bisa melindunginya dari putusan @officialMKRI dan @MahkamahAgung,” tulis Nicho.

Ia kemudian melontarkan kritik keras agar Gibran tidak melakukan manuver politik apabila memang serius ingin mengundurkan diri.

“Eh bengak, kalau niat mundur ya mundur aja. Nggak usah berakrobatik sambil cek ombak,” sindirnya.

Lebih jauh, Nicho menyarankan Gibran segera mengundurkan diri apabila masih memiliki etika dan moral dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Desakan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai Surat Keterangan (Suket) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam unggahannya, Nicho menyebut MA telah menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Ia menilai putusan tersebut semestinya menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan wakil presiden.

“Ingat ya, apa pun yang dihasilkan dari dasar ilegal maka keseluruhannya akan menjadi ilegal pula. Sama seperti dirimu yang tidak memiliki ijazah SMA/sederajat, tetapi menggunakan Suket untuk pendaftaran ke KPU. Tapi dibatalkan MA,” tulisnya.

Nicho bahkan mempertanyakan legitimasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Beda Nasib Wapres yang Mundur dan Dimakzulkan, Mulai dari Proses hingga Hak Pensiun

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.48 WIB



Foto Gibran Rakabuming Raka yang mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru muda sedang menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Di latar belakang, tampak sebuah mobil

BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat pada Rabu, 11 November 2026.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut.

Gibran juga disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

Perkembangan ini terjadi ketika tekanan Politik terhadap posisi Gibran semakin menguat.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan dirinya.

Situasi tersebut membuat publik menyoroti dua mekanisme yang sama-sama dapat mengakhiri jabatan seorang Wakil Presiden sebelum masa tugasnya selesai, yakni mengundurkan diri dan dimakzulkan.

Meski memiliki akibat berupa berakhirnya masa jabatan, keduanya tidak bisa disamakan.

Pengunduran diri berasal dari kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.

Gibran Mundur, Bagaimana Mekanisme Pengunduran Diri Wapres?

Pengunduran diri merupakan keputusan seorang pejabat untuk melepaskan jabatannya atas kemauan sendiri.

Dalam konteks Wakil Presiden, mekanisme ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.

Pasal 8 ayat (1) mengatur kondisi ketika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) secara khusus mengatur pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi Wakil Presiden.

Dalam aturan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran telah ditetapkan dan menimbulkan kekosongan jabatan secara resmi, proses selanjutnya adalah pengisian posisi Wakil Presiden melalui mekanisme yang diatur konstitusi.

Artinya, pengunduran diri tidak harus diawali dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Mahkamah Konstitusi. Jalurnya berbeda dengan proses pemakzulan.

Dimakzulkan Harus Melalui DPR, MK, dan MPR

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam konstitusi.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945. Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Pemberhentian juga dimungkinkan apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tertunduk Lesu, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Secara Tidak Hormat

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.46 WIB

BANDA ACEH -Jenderal Polisi bintang dua, Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Irjen Ahrie dipecat usai jadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Santer Dikabarkan Mundur, Gibran Tinggalkan Istana Wapres!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.35 WIB



BANDA ACEH - Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wakil Presiden di tengah penantian awak media yang sejak pagi menunggu kejelasan terkait kabar pengunduran dirinya. Momen tersebut luput dari pantauan puluhan jurnalis yang saat itu tengah beristirahat di kantin.Situasi ini terjadi setelah sebelumnya pihak Istana Wakil Presiden menyampaikan bahwa Gibran dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu, 11 November 2026. Namun, agenda tersebut mendadak dibatalkan tanpa penjelasan mengenai alasan pembatalannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran masih menjalankan aktivitasnya di Istana Wakil Presiden pada Rabu siang. Ia disebut sempat menerima sejumlah tamu internal, meskipun aktivitas tersebut tidak terlihat langsung oleh wartawan karena adanya pembatasan akses menuju area dalam istana.

Sekitar pukul 15.00 WIB, Gibran disebut telah meninggalkan kantornya. Namun, pergerakannya saat keluar dari kawasan Istana Wapres tidak terpantau oleh awak media.

Menjelang petang, beredar informasi bahwa Gibran akan menyampaikan pernyataan kepada media melalui konferensi pers. Kabar tersebut membuat para jurnalis kembali bersiaga di sekitar area parkir Istana Wakil Presiden.

Hal tersebut terjadi tepat setelah santernya kabar bahwa Gibran sudah menandatangani surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo.

Sejak sekitar pukul 18.00 WIB, puluhan wartawan mulai menyiapkan kamera dan peralatan pelipur tan untuk menunggu kehadiran Gibran. Sebagian pegawai Sekretariat Wakil Presiden juga terlihat berkumpul di area tersebut.

Namun, setelah menunggu lebih dari 30 menit tanpa adanya tanda-tanda konferensi pers, para jurnalis akhirnya menjauh dari area parkir dan beristirahat di kantin setelah diminta petugas untuk menepi.

Justru pada saat itulah Gibran terlihat meninggalkan Istana Wakil Presiden sekitar pukul 19.00 WIB.

Momen tersebut membuat awak media yang telah menunggu sejak pagi tidak mendapatkan kesempatan untuk meminta keterangan langsung dari Gibran terkait kabar pengunduran dirinya.

Pengunduran Diri Gibran Jadi Sorotan

Kabar pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian setelah Budi Arie membenarkan informasi tersebut. Gibran disebut telah menyampaikan keputusan mundur sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo pada Rabu sore.

Menurut informasi yang beredar, Gibran semula direncanakan menyampaikan pengumuman terkait keputusannya pada Rabu malam. Namun, agenda tersebut urung terlaksana.

Gibran dikabarkan baru akan menyampaikan pengumuman sekaligus menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

IPW Tolak Usulan Listyo Sigit Diadili di Pengadilan Militer: Polisi Tunduk Peradilan Umum

Oleh Redaksi · 10 Nov, 22.01 WIB

BANDA ACEH - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menolak wacana yang mengusulkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diadili di pengadilan militer terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena anggota Polri tunduk pada peradilan umum.

"Mengusulkan Mahkamah Militer itu enggak benar sama sekali. Karena kalau mau mengadili Saudara LSP, undang-undang sudah menyatakan polisi itu tunduk pada peradilan umum. Kalau kemudian dikatakan dia harus dimahmilkan, dia bukan militer, sistem ketatanegaraan kita (sudah jelas)," ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" yang ditayangkan di iNews, Selasa (10/11/2026).

Sugeng menilai, penanganan perkara terhadap Listyo Sigit harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga meminta masyarakat memahami aturan mengenai kewenangan lembaga peradilan agar tidak muncul pemahaman yang keliru.

"Ya kalau saya kan hukum ya, saya bicara hukum nih supaya masyarakat kita itu diliterasi dengan benar, bukan ngoceh gitu loh ya. Coba kasih kalau ada argumentasi hukumnya, saya pun ikut gitu loh," tuturnya.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Di tengah proses hukum tersebut, muncul perdebatan mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili para perwira tinggi Polri, termasuk usulan agar perkara ditangani melalui Mahkamah Militer.

Saat ditanya apakah warga sipil atau anggota kepolisian mutlak tidak dapat diadili di Mahkamah Militer, Sugeng menjelaskan terdapat pengecualian melalui mekanisme peradilan koneksitas.

"Ya iya dong, kecuali kalau koneksitas ini sudah benar koneksi," katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Heboh Gibran Mau Mundur dari Wapres, Netizen Sentil Prabowo: Tolak! Makzulkan di DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.58 WIB



BANDA ACEH -Kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari kursi Wapres memicu komentar netizen. Prabowo diminta menolak dan mendorong pemakzulan di DPR.

Isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI semakin ramai diperbincangkan.

Di tengah polemik yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut, muncul desakan dari warganet agar Presiden Prabowo Subianto tidak begitu saja menerima keinginan mundur sang wakil presiden.

Ia justru berharap Prabowo menolak permintaan pengunduran diri Gibran dan mendorong proses pemakzulan melalui DPR.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena dinilai menyentil posisi Politik Gibran di tengah polemik yang sedang berkembang.

“Semoga Pak Prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur,” tulis akun tersebut dalam unggahannya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Komentar itu memperlihatkan adanya suara kritis di media sosial terhadap kemungkinan Gibran mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri.

Bagi warganet tersebut, mundur secara sukarela dianggap bukan pilihan yang seharusnya begitu saja diterima.

Polemik ini bermula setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap adanya pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu disebut membahas sejumlah persoalan politik dan hukum yang berkembang belakangan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Keinginan itu muncul di tengah dinamika yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pernyataan tersebut sontak memicu perhatian publik.

Pasalnya, jabatan wakil presiden merupakan posisi strategis dalam pemerintahan yang tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi politik dan konstitusional.

Meski kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian, Prasetyo membantah informasi yang menyebut Prabowo secara tegas menolak keinginan tersebut.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Artinya, belum ada keterangan resmi bahwa Prabowo menerima ataupun menolak permintaan pengunduran diri sang wakil presiden.

Selain membicarakan persoalan jabatan, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dipecat Polri gegara Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Melawan Lewat Banding

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.53 WIB

BANDA ACEH - Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan, permohonan banding tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ajudan Jokowi Beberkan Kesaksian soal Ijazah hingga Sikap Jokowi Hadapi Tuduhan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.41 WIB



BANDA ACEH — Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ternyata telah lama menghadapi tudingan ijazah palsu, bahkan sejak masih menjabat sebagai kepala negara. Namun, Jokowi baru memutuskan menempuh jalur hukum setelah purna tugas karena tuduhan tersebut masih terus berlanjut.

Hal itu diungkapkan ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Syarif menjelaskan bahwa Jokowi sebenarnya sudah lama merasakan serangan dan tuduhan terkait keaslian ijazahnya. Meski demikian, saat itu Jokowi belum memiliki niat untuk melaporkannya ke kepolisian.

"Mungkin sedikit kami menjelaskan, Yang Mulia. Sebenarnya ini sudah lama yang dirasakan oleh beliau, akan tetapi beliau belum ada niatan pada saat waktu itu ya, kami sudah lupa beberapa tahun untuk membuat laporan polisi," ujar Syarif di ruang sidang.

Menurut Syarif, tudingan tersebut ternyata tidak berhenti setelah Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Serangan dan tuduhan serupa masih terus dialami sehingga akhirnya Jokowi memilih mengambil langkah hukum.

"Nah, hingga akhirnya beliau sudah purna, beliau merasakan hal yang sama, walaupun beliau sudah purna akan tetapi masih ada serangan atau tuduhan terkait mengenai ijazah palsu ini," katanya.

Syarif menegaskan, keputusan Jokowi melaporkan persoalan tersebut ke polisi bertujuan memperoleh kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan.

Dalam persidangan itu, Syarif juga mengungkap reaksi Jokowi ketika diperlihatkan sejumlah unggahan dan video yang memuat tudingan terkait ijazah sarjana miliknya. Konten tersebut antara lain mempersoalkan skripsi hingga lembar pengesahan ijazah.

Dia mengaku beberapa kali melihat perubahan ekspresi Jokowi ketika menerima informasi mengenai tuduhan tersebut. Menurutnya, Jokowi berusaha menahan emosi setiap kali diperlihatkan konten yang menyerang keaslian dokumen pendidikannya.

"Sepengetahuan kami, kami tahu beliau sudah sangat bersabar, Yang Mulia. Ketika kami menunjukkan video ataupun postingan terkait adanya tuduhan, kami melihat mimik beliau berubah seperti menahan emosi," ucap Syarif.

Bahkan, kata dia, kesabaran Jokowi menghadapi tudingan tersebut telah berlangsung berulang kali sebelum akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi.

"Dan menurut kami hingga beliau datang ke Polda Metro dan membuat laporan polisi itu, itu sudah berkali-kali beliau menahan," tuturnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bambang Pacul Buka Suara soal Pemakzulan Gibran, MPR Tunggu Apa?

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.49 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan MPR belum menerima surat usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut MPR baru akan mengambil peran setelah seluruh tahapan konstitusional di DPR selesai.

"Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Bambang menjelaskan, usulan HMP saat ini masih berada dalam ranah DPR. Karena itu, MPR belum bisa mengambil sikap ataupun memberikan penilaian lebih jauh terkait proses tersebut.

"Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir," ujarnya.

Terkait keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang sepakat menempuh HMP, Bambang menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan resmi organisasi. Menurutnya, sikap itu bukan keputusan pribadi anggota dewan.

"Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear," ucapnya.

Dia menilai keputusan melalui rapat pleno fraksi penting untuk menyatukan sikap seluruh anggota dalam menentukan langkah Politik. Dengan demikian, dukungan terhadap HMP tidak semata-mata didasarkan pada persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.

"Bukan soal like and dislike, ini maka ada pleno fraksi yang menyolidkan," katanya.

Bambang juga enggan menanggapi respons Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait keputusan fraksi tersebut. Dia menegaskan, sikap yang telah diumumkan merupakan keputusan organisasi, bukan pendapat perorangan.

"Jangan tanya respons Bu Ketum, kita di sini fraksi. Fraksi ini tentu namanya juga organisasi sifatnya organisatoris, tidak ada orang per orang," ujarnya.

Sementara itu, Bambang Pacul memilih tidak berkomentar mengenai rencana Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik dokumen pendidikannya.

Dia khawatir tanggapannya justru menjadi pendapat subjektif dan spekulatif. Terlebih, posisinya sebagai pimpinan MPR membuatnya harus berhati-hati dalam menyampaikan pandangan.

"Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya," katanya.

Bambang Pacul menyebut MPR belum menerima usulan HMP pemakzulan Gibran. Dia menegaskan MPR merupakan kamar terakhir dalam proses tersebut.

NASIONAL

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR karena mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi antarparlemen di tingkat internasional.

Kholid menjelaskan, Hidayat ditugaskan memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Selain itu, diplomasi tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujar Kholid dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan. PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Dia menilai hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Islam, perlu diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama dan langkah diplomasi konkret. Jangkauan diplomasi juga perlu diperluas kepada negara-negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia.

"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," tegasnya.

Kholid menambahkan, diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada hasil nyata, mulai dari perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, hingga dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya," kata Kholid.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengunduran Diri Gibran Bikin Anggaran Negara Boncos

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.50 WIB

BANDA ACEH -Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu sorotan tajam terhadap potensi beban anggaran negara, khususnya terkait hak pensiun dan fasilitas melekat bagi mantan pejabat tinggi.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menyoroti perbedaan konsekuensi hukum dan finansial antara pejabat yang mundur secara sukarela dengan yang diberhentikan melalui mekanisme hukum.

"Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Negara boros lagi kan. Dia jadi mantan Wakil Presiden," kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Suparji menjelaskan, skenario pemberhentian tidak dengan hormat memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap hak-hak keuangan pascajabatan, termasuk pencabutan hak pensiun.

Meski demikian, seluruh konsekuensi tersebut tetap wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dasar hukum pemberhentian yang sah.

Dalam ranah ketatanegaraan, pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat ditempuh sekadar berdasarkan pertimbangan politis. Mekanisme tersebut diatur ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan peran DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Gibran Dinilai Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.45 WIB



BANDA ACEH - — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustofa dalam rapat bersama perwakilan pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saan mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mendukung penggunaan hak menyatakan pendapat.

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.

Adapun rincian anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Saan menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.

"Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat Anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tata Tertib DPR RI," ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan materi yang disampaikan para pengusul, HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.

Pasal tersebut mengatur hak menyatakan pendapat DPR atas dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sebagai Wapres Republik Indonesia.

"Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 4 huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," tutur Saan.

Saan menegaskan, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR

NASIONAL

Tindak Lanjuti Usulan HMP Pemakzulan Gibran, DPR Gelar Paripurna Besok

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.25 WIB



BANDA ACEH -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ratusan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna.

"Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI," kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

"Jadi, akan kami rapat pimpinan (Rapim) dan nanti akan kami Bamus (Badan Musyawarah)kan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan," sambungnya.

Saan mengungkapkan bahwa Rapat Paripurna DPR terdekat akan digelar pada Kamis besok, 12 November 2026.

"Dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10.00 WIB-an," katanya.

Seluruh Fraksi di DPR RI resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Anggota DPR RI terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan disampaikan oleh delapan fraksi di DPR RI yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra, dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

Masing-Masing Juru Bicara Fraksi menyampaikan pandangan dan dan daftar nama-nama Anggota DPR RI fraksi terkait yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran.

Pantauan RMOL di lokasi, Juru Bicara Fraksi PDIP diwakili Dolfie O.F.P, Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia, Fraksi NasDem diwakili Sugeng Suparwoto, Fraksi PKS diwakili Mardani Ali Sera, Fraksi PAN Sarifuddin Sudding, Fraksi Demokrat Benny K Harman, dan Fraksi Gerindra Azis Subekti.

Adapun, jumlah anggota DPR RI yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran berdasarkan fraksi yakni:

Fraksi PDIP 14 Orang
Fraksi Nasdem 18 Orang
Fraksi Golkar 11 Orang
Fraksi PAN 1 Orang
Fraksi Demokrat 19 Orang
Fraksi PKS 28 Orang
Fraksi PKB 18 Orang
Fraksi Gerindra 11 Orang.

NASIONAL

Ke Mana Idham Azis? Tito Irit Bicara, Da'i Bachtiar Mengaku Tak Tahu

Oleh Redaksi · 10 Nov, 20.55 WIB

BANDA ACEH - Absennya mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Idham Azis dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, masih menjadi sorotan.Diketahui, beberapa hari yang lalu, Prabowo menemui 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan Prabowo dengan purnawirawan pimpinan Polri itu berlangsung di tengah mencuatnya isu penyadapan komunikasi Presiden yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang tengah terjadi.

Ke- 10 mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah:

Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Dari Mantan Kapolri dalam hampir 30 tahun terakhir tersebut, hanya Jenderal Purnawirawan Idham Aziz yang tidak tampak hadir.

Keberadaan Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolri sejak 1 November 2019 hingga 27 Januari 2021 ini pun menuai tanda tanya.

Terlebih hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Idham Azis terkait ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut.

Lantas, sebenarnya ke mana Idham Azis? Berikut penjelasan dari dua mantan Kapolri, dirangkum Tribunnews.com:

Tito Karnavian adalah Kapolri periode 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019.

Ia ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang kala itu akan segera pensiun.

Pada 22 Oktober 2019, Kapolri Tito diberhentikan dengan hormat oleh Jokowi melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui DPR.

Sehari kemudian, ia dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Jabatan ini terus berlanjut di era Prabowo. Dan pada 5 November 2024, Tito juga diangkat oleh Prabowo menjadi Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, posisinya kemudian digantikan Idham Azis.

Menanggapi ketidakhadiran suksesornya tersebut, Tito Karnavian memilih untuk tidak memberikan penjelasan.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan absennya Idham Azis.

Tito hanya menyebut, kehadirannya dalam pertemuan bersama para Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) di Hambalang tersebut didasari oleh undangan yang ia terima.

"Bapak Idham Azis, saya enggak tahu (kenapa absen). Saya diundang, otomatis saya hadir, dan itu aja," ungkap Tito di Istana …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dikabarkan Mundur, Gibran Bakal Fight di PTUN Buktikan Keabsahan Ijazah

Oleh Redaksi · 10 Nov, 18.59 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara menanggapi kabar pengunduran dirinya yang sebelumnya diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Selasa, 10 November 2026, Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat di tengah dinamika Politik yang berkembang.

Dia berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut menjadi polemik politik.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran.

Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.

Dia menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Niat Mundur, Anggota DPR Tegaskan Wacana Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Tetap Jalan

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.08 WIB

BANDA ACEH - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan niat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan.

Doli mengatakan, proses komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum muncul informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri.

"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, proses HMP yang berjalan di DPR merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah SMA Gibran. Menurutnya, putusan dua lembaga peradilan tersebut harus segera direspons parlemen.

"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Doli menyebut komunikasi lintas fraksi terus berlangsung. Dia juga membuka kesempatan bagi anggota DPR yang ingin menggunakan HMP sebagai hak konstitusional legislator.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

BRIN Dorong Periset Muda Bongkar Rahasia Manuskrip Nusantara

Oleh Syarifudin Brutu · 11 Nov, 13.30 WIB



Seminar BRIN membahas pengungkapan pengetahuan ekologis dan kebencanaan dalam manuskrip serta tradisi lisan Nusantara. (Dok. BRIN)

JAKARTA – Kekayaan manuskrip dan tradisi lisan Nusantara masih menyimpan pengetahuan yang belum banyak terungkap. Mulai dari kearifan ekologis, sejarah lingkungan, hingga pengalaman masyarakat menghadapi bencana, warisan budaya tersebut dinilai memiliki nilai penting bagi kehidupan masa kini. Namun, pengembangannya membutuhkan lebih banyak peneliti muda yang mampu menggali dan menerjemahkan pengetahuan masa lalu menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupaya menjawab kebutuhan tersebut dengan memperkuat regenerasi peneliti sejak bangku perkuliahan. Langkah ini dilakukan melalui pembinaan talenta mahasiswa serta kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dan sejumlah mitra.

Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (OR Arbastra) BRIN, Herry Jogaswara, menilai pelestarian warisan budaya tidak cukup hanya dengan menyimpan manuskrip atau mendokumentasikan tradisi lisan. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk meneliti, menafsirkan, dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Herry dalam seminar bertajuk Membaca Alam, Mengingat Bencana: Kosmologi dan Ekologi dalam Manuskrip serta Tradisi Lisan Nusantara di Jakarta, Senin, 9 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pembentukan OR Arbastra merupakan bagian dari kesadaran BRIN terhadap pentingnya warisan budaya sebagai bidang penelitian yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satu bukti bahwa pengetahuan tradisional memiliki manfaat nyata terlihat dari kisah Smong di Kabupaten Simeulue, Aceh. Pada 2005, Herry bersama ahli geologi Eko Yulianto pernah melakukan penelitian di wilayah tersebut atas penugasan UNESCO. Dalam kegiatan itu, Eko meneliti aspek geologi dan kondisi tanah, sementara Herry menelusuri pengetahuan masyarakat melalui cerita serta informasi yang diwariskan secara turun-temurun.

Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tradisi lisan masyarakat Simeulue bukan sekadar cerita peninggalan leluhur. Pengetahuan Smong memuat pemahaman mengenai tanda-tanda alam dan tindakan yang perlu dilakukan ketika ancaman tsunami terjadi. Agar pesan tersebut dapat menjangkau lebih banyak orang, pengetahuan lokal itu kemudian disebarluaskan melalui berbagai media, seperti siaran radio, pertunjukan musik, hingga komik.

Menurut Herry, penelitian mengenai warisan budaya tidak seharusnya berhenti setelah menghasilkan publikasi ilmiah. Hasil kajian perlu diterjemahkan ke dalam bentuk komunikasi yang mudah dipahami masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan yang sebelumnya tersimpan dalam tradisi lokal dapat terus hidup dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

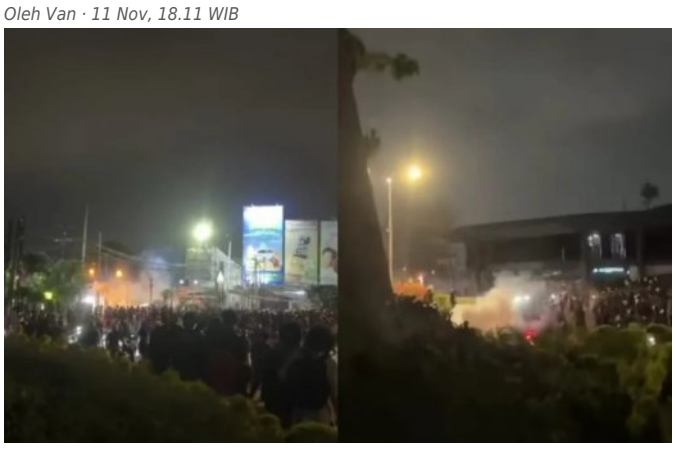
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sempat Memanas hingga Dini Hari, Polisi Ungkap Kronologi Kericuhan di Bundaran UGM

Oleh Van · 11 Nov, 18.11 WIB



Massa memadati jalanan dalam sebuah aksi unjuk rasa yang berlangsung pada malam hari.

JAKARTA — Ramai di media sosial diduga anggota kepolisian masuk ke area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) saat terjadi kericuhan usai penyampaian aspirasi mahasiswa di Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026 dini hari.

Kericuhan yang terjadi di kawasan Bundaran UGM berlangsung dari Selasa hingga Rabu, 11 November 2026 dini hari.

Dalam video yang beredar, polisi diduga masuk ke area kampus dan menembakkan gas air mata.

"Saya tegaskan, tidak ada penembakan gas air mata yang mengarah ke dalam lokasi kampus, termasuk tidak ada anggota yang merangsek ke dalam batas lokasi kampus UGM," ujar Kapolresta Sleman AKBP Dhimas Pras dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.

Lebih lanjut, ia mengatakan sempat melakukan dialog dengan massa bernegosiasi agar membubarkan diri.

"Sekitar pukul 03.00 WIB atau 02.30 WIB, saya berusaha negosiasi, saya mendatangi kerumunan massa untuk saya minta tenang, mengimbau dan saya diterima," imbuhnya.

"Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa dari pihak aparat untuk mundur ke Jalan Cik Ditiro dan massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 03.30 WIB," jelasnya.

Kronologi Kericuhan Menurut Kepolisian

Adapun penyebab kericuhan, kata Dhimas berasal dari dugaan penganiayaan warga yang melintas dan pembakaran water barrier.

"Kami mempertimbangkan bahwa di situ juga adalah tempat pertemuan arus lalu lintas yang perlunya disterilisasi dan supaya lancar bagi aktivitas masyarakat, saya bersama dengan anggota kepolisian, baik dari Polresta Sleman dan dari Polda mendatangi lokasi untuk memadamkan api," terangnya.

"Namun, dari arah depan Kagama, kami disambut hujan batu. Kami tetap bertahan, kemudian ada massa dari Jalan Colombo, dan kami berhadapan dengan massa depan Kagama dan masih mendapat lemparan," sambungnya.

Sementara itu, polisi mengamankan 154 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan dan menyita sejumlah barang bukti seperti 6 botol molotov, petasan, senjata tajam, dan satu ketapel.(*)

NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra Respons Gibran Mau Buktikan Ijazah Asli di PTUN: Gak Ada Gunanya

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.03 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada gunanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebab, perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final.

Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.

"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan langkah tersebut tidak akan berguna karena substansi perkara sudah diputus MA.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Yusril menambahkan, pembuktian mengenai keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan.

Sementara itu, jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikannya melalui media sosial.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," katanya.

Sebelumnya, Yusril juga menjelaskan putusan MK dan MA tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjabat sebagai Wapres.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ucapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hanum Rais Minta Jangan Langsung Percaya Gibran Mau Mundur, 'Bapak Anak Suka Sen Kanan Belok Kiri'

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.31 WIB

BANDA ACEH - Putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, mengingatkan publik agar tidak terburu-buru mempercayai kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.Hanum menyampaikan hal tersebut setelah muncul informasi bahwa Gibran berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika Politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Seeing is believing. Baru 'berniat'. Ingat, bapak anak suka sen kanan belok kiri. Hati-hati," kata Hanum dalam keterangannya.

Sebelumnya, pihak Istana membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Namun, Presiden juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

162 Siswa dan Guru Diduga Keracunan MBG di Sleman, Kadisdik Marah ke SPPG

Oleh Van · 11 Nov, 11.07 WIB



Tim katering memastikan standar kebersihan tinggi saat menyiapkan porsi makanan sehat.

SLEMAN — Sebanyak 162 orang, terdiri dari 150 siswa dan 12 guru, diduga mengalami keracunan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua sekolah wilayah Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 10 November 2026. Para korban berasal dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Cangkringan dengan keluhan mual, muntah, hingga diare.

Panewu Cangkringan Dewanto Tri Nugroho membenarkan bahwa korban tidak hanya berasal dari kalangan siswa. “Jadi total guru 12 dan murid yang keracunan 150 orang,” ujarnya saat memberikan keterangan pada Selasa, 10 November 2026.

Dugaan keracunan muncul setelah para siswa dan guru mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Senin, 9 November 2026. Menu tersebut terdiri dari nasi, ayam, jagung muda, dan sayur sawi.

162 Orang Alami Gejala Setelah Konsumsi MBG

Data korban sempat mengalami perubahan seiring pendataan di sekolah. Laporan awal menyebut 128 siswa SMPN 2 Cangkringan mengalami gejala serupa.

Pendataan berikutnya mencatat korban dari dua sekolah. Rinciannya, 137 orang di SMPN 2 Cangkringan dan 25 orang di SMPN 1 Cangkringan, sehingga totalnya mencapai 162 orang.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Sleman, Tri Tukijo, mengatakan pihaknya menerima laporan kedaruratan pada pukul 10.22 WIB dan langsung menuju lokasi.

“Menurut dari keterangan guru sekolah, bergejalanya semalam sampai hari ini,” kata Tri saat menjelaskan waktu kemunculan gejala pada korban.

Seluruh korban mendapatkan penanganan dari petugas Puskesmas Cangkringan. BPBD juga menyiagakan dua ambulans dan tujuh personel untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pasien yang perlu dirujuk.

SPPG Umbulharjo Jadi Sorotan

Kasus ini turut menyoroti operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo yang memasok makanan untuk para penerima MBG di sekolah terdampak.

Dewanto mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang, terutama karena menyangkut keselamatan anak-anak. “Saya sudah sampaikan untuk jadi evaluasi, jangan sampai kejadian lagi karena ini masalah bocah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Umbulharjo Intan Khurniawati menyatakan penelusuran kejadian masih berlangsung bersama pihak terkait. Ia mengatakan penyebab gangguan kesehatan belum dapat dipastikan sebelum pemeriksaan selesai.

“Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah ada hasil pemeriksaan dari instansi berwenang,” ujarnya.

Karena itu, dugaan keracunan akibat MBG belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir. Pemeriksaan makanan dan penelusuran proses pengolahan serta distribusi diperlukan untuk memastikan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PDIP Heran Gibran Niat Mundur tapi Ingin Buktikan Ijazah di PTUN: Mau Ulur Waktu

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.12 WIB

BANDA ACEH - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus heran dengan langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri, tetapi meminta waktu untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Deddy menilai, putusan PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurut dia, PTUN memiliki kewenangan menangani sengketa terkait keputusan pejabat negara atau birokrasi.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).

Dia juga menyinggung gugatan terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang sebelumnya pernah diajukan ke PTUN. Menurut Deddy, dalam proses tersebut tidak ada bukti baru yang dihadirkan perwakilan kementerian terkait hingga pemohon akhirnya mencabut gugatan.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa?" ujar Deddy.

Anggota Komisi II DPR itu menilai rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN sebagai upaya mengulur waktu.

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Pertemuan keduanya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Suasana Istana Wapres Usai Gibran Dikabarkan Mundur, ASN Saling Berpelukan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.43 WIB



BANDA ACEH - Kompleks Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) dipadati awak media pada Rabu (11/11/2026) malam. Wartawan berbondong-bondong mendatangi Istana Wakil Presiden, tempat Gibran Rakabuming Raka berkantor, menyusul kabar mengenai niat pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar pukul 18.20 WIB, sejumlah kamera televisi telah berjajar di jalur masuk kendaraan menuju Istana Wapres. Para jurnalis bersiaga untuk menunggu kemungkinan pernyataan dari Gibran.

Namun, setelah awak media menunggu, pihak Wakil Presiden menyampaikan bahwa tidak akan ada pernyataan dari Gibran pada hari itu.

Wartawan kemudian sempat diarahkan menuju Kantin Mersela untuk menyantap kudapan yang telah disiapkan. Di tengah pergeseran awak media tersebut, suasana berbeda justru terlihat di lingkungan kantor Setwapres.

ASN Setwapres Saling Berpelukan

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Setwapres tampak berkumpul di pelataran depan dan area parkir kantor. Mereka terlihat saling berpelukan, bersalaman, serta menepuk bahu satu sama lain.

Beberapa staf Gibran dan sekretaris pribadinya (sespri) juga terlihat berada di area tersebut. Momen itu berlangsung ketika awak media masih berada di kompleks Setwapres untuk menunggu perkembangan informasi mengenai kabar pengunduran diri Wakil Presiden.

Meski demikian, akses wartawan untuk mengambil gambar atau mengabadikan momen tersebut dibatasi. Akibatnya, jurnalis yang berada di lokasi hanya dapat memantau aktivitas itu dari jarak jauh, termasuk dari sekitar area parkir.

Suasana berkumpul dan saling berpelukan di antara ASN tersebut menjadi salah satu momen yang terlihat di kompleks Setwapres pada malam ketika isu pengunduran diri Gibran kembali menjadi perhatian.

NASIONAL

Gibran Mau Dimakzulkan, Luhut: Mau Dibawa Kemana Negeri Ini Gontok-gontokan Terus

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.23 WIB



BANDA ACEH -- Wacana Hak Menyatakan Pendapat di Senayan menjadi perhatian karena menyasar dugaan ijazah bermasalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu respons akan hal tersebut datang dari Luhut Binsar Pandjaitan.Luhut pasang badan dan mengingatkan adanya paradoks konstitusional, mengingat kemenangan politikus muda itu pada pilpres lalu adalah satu kesatuan paket dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia membedah kompleksitas eskalasi Politik di Senayan. Gibran menurutnya telah melalui tahapan verifikasi yang panjang dan sah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, upaya pelengseran secara paksa di tengah jalan diyakini hanya akan memicu krisis legitimasi yang lebih luas.

“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo’. Jadi gimana statusnya,” tegas Luhut dikutip Selasa (10/11/2026).

Terkait polemik ijazah yang dijadikan peluru utama oleh para anggota dewan, ia secara meyakinkan membantah tudingan miring tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PAN Nilai Tak Ada Jalur Hukum Lagi Buat Gibran: Pilihannya Hanya Mundur atau Diberhentikan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 11.06 WIB



BANDA ACEH - Ketua Fraksi PAN MPR Sarifuddin Sudding menyebut Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hanya memiliki dua pilihan terkait polemik keabsahan ijazah SMA atau setara. Menurutnya, Gibran bisa mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Sudding menilai, tidak ada lagi jalur hukum lain yang dapat ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/TUN/2026 yang menurutnya telah menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.

Dia juga menyebut putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dipatuhi.

"Sehingga keputusan itu harus ditaati, ditaati apakah secara sukarela atau di eksekusi dengan cara pemberhentian saudara Gibran selaku Wapres karena sudah tidak memenuhi lagi syarat selaku Wapres sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7A Konstitusi UUD 45," ucap Sudding saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).

Sudding menegaskan, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, semua pihak harus mematuhi putusan pengadilan, baik MA maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga menilai langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dilakukan jika perkara tersebut memiliki objek dan substansi yang sama dengan perkara yang telah diputus.

"Bahwa kemudian saudara Gibran ingin kembali membuktikan ijazahnya lewat PTUN sudah ne bis in idem, suatu perkara yang sudah diperiksa, disidang dan diputus oleh pengadilan yang sama dan objek yang sama dinyatakan tidak dapat diterima," tuturnya.

Meski demikian, dia kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya hanya ada dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

"Hanya dua pilihan bagi saudara Gibran apakah mundur secara sukarela atau diberhentikan lewat jalur konstitusi oleh MPR atas usul DPR lewat hak menyatakan pendapat," ucap Sudding.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berlarut-larut. Dia mengaku akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran menyampaikan hal itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Prabowo, termasuk untuk tetap menempuh proses hukum di PTUN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kubu Roy Suryo Ajukan Permohonan Uji Forensik Ijazah Jokowi ke Majelis Hakim

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.34 WIB



BANDA ACEH - Tim penasihat hukum Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Surat permohonan tersebut diajukan dalam persidangan kasus fitnah ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo.

Pengacara Roy Suryo, Refly Harun menyatakan, permohonan ini penting untuk menguji keaslian ijazah fisik yang sebelumnya diperlihatkan di persidangan.

Pihaknya meminta agar ijazah fisik milik Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan dengan setidaknya tiga ijazah pembanding terverifikasi yang terbit pada periode yang sama, yakni November 1985.

"Pengujian forensik harus menggunakan pembanding yang autentik. Jika pembandingnya tidak autentik atau tidak ada autentifikasi, maka hasil uji forensik tersebut bisa menyesatkan," kata Refly usai persidangan di PN Jaktim, Rabu (11/11/2026).

Selain diserahkan langsung kepada majelis hakim sebelum sidang ditutup, surat permohonan tersebut ditembuskan ke sejumlah instansi serta pejabat tinggi negara. Di antaranya Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Komisi III DPR RI, Jaksa Agung, Ketua Ombudsman, hingga pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Refly menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo pada dasarnya berfokus pada dokumen yang diunggah Dian Sandi di media sosial, bukan secara langsung menyerang ijazah fisik yang dimiliki Jokowi. Oleh karena itu, menurutnya secara hukum fakta ini tidak serta-merta berkaitan dengan ijazah yang diperlihatkan Jokowi sebelumnya.

"Penelitian Mas Roy itu terkait apa yang diunggah oleh Dian Sandi. Jadi secara hukum sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ijazah fisik yang kemarin diperlihatkan, kecuali jika kita memang ingin menguji keaslian ijazah analog tersebut secara menyeluruh," katanya

NASIONAL

Sidang Etik, Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 20.41 WIB



BANDA ACEH - Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Hasilnya, sidang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.Putusan itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.

Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keracunan MBG Kembali Terjadi di Cirebon, DPRD Minta Dapur Penyedia Makanan Dihentikan

Oleh Van · 10 Nov, 23.26 WIB

CIREBON — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon, Senin, 9 November 2026. Sebanyak 25 siswa terdampak setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Harjamukti 01.

“Di sini kami kecewa. Harus ada sanksi,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, saat meninjau dapur penyedia makanan tersebut.

DPRD meminta Wali Kota Cirebon menghentikan sementara operasional SPPG Harjamukti 01. Para siswa yang terdampak juga telah dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

Baru Lima Hari Sepakat Perbaiki Pengawasan

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi hanya lima hari setelah seluruh pengelola dapur MBG di Kota Cirebon menandatangani komitmen tertulis untuk mematuhi aturan keamanan pangan.

Komitmen itu dibuat pada 4 November 2026. Isinya antara lain mewajibkan pengelola menggunakan bahan baku segar, memastikan asal bahan dapat ditelusuri, serta mengolah makanan langsung di dapur masing-masing.

Namun, insiden kembali terjadi di SPPG Harjamukti 01. Dapur tersebut diketahui memasok hingga 2.500 porsi makanan setiap hari untuk 14 sekolah di wilayah Harjamukti.

Umar menilai pengawasan dan tanggung jawab penyedia makanan perlu diperkuat. Menurut dia, pertanggungjawaban tidak cukup hanya dibebankan kepada kepala dapur, tetapi juga perlu melibatkan yayasan dan mitra penyelenggara.

Bukan Kasus Pertama di Cirebon

Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SPPG Kalijaga 05 pada Oktober 2026.

DPRD mencatat 395 orang terdampak dalam insiden tersebut, dengan 218 orang masih menjalani perawatan saat data disampaikan pada 26 Oktober.

DPRD menyebut kepala SPPG Kalijaga 05 telah diberhentikan dan dapurnya ditutup.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Minta Prabowo Beri Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.24 WIB

BANDA ACEH - - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Dia mengatakan, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wapres di tengah dinamika terkait persoalan dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Respons Said Didu usai Disomasi Golkar terkait Tudingan Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.47 WIB



BANDA ACEH - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu buka suara usai disomasi Partai Golkar terkait pernyataannya yang dianggap menuding Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan yang menjadi latar belakang Somasi itu disampaikan Said dalam sebuah siniar yang diposting di YouTube.

Said menegaskan dirinya sama sekali tidak menuduh Bahlil dalam siniar tersebut. Dia juga memastikan belum mendapatkan informasi terkait pertemuan sebelum penangkapan para tersangka yang terlibat penyadapan presiden.

"Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan/rapat tersebut," kata Said dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Dia menambahkan, pernyataan yang dilayangkannya tersebut merupakan produk pers. Dengan begitu, jika ada substansi yang bertentangan, maka seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers.

"Ini adalah produk pers, sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers, bukan lewat jalur hukum," tuturnya.

Dalam potongan tayangan siniar yang beredar tersebut, Said berpandangan hanya ada beberapa ketua umum partai Politik yang dekat dengan salah satu tersangka penyadapan presiden, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Nah, kalau ada ketua partai, siapa ketua partai yang dekat dengan Sigit? AHY ga mungkin, Megawati engga mungkin, Surya Paloh kayanya engga. Nah yang agak panjang dengan Sigit kan adalah, kan hanya ketuanya Bung Indra Piliang (Golkar) yang agak panjang dengan Sigit dan sama-sama dibesarkan oleh Jokowi," ucap Said dalam potongan siniar tersebut.

"Kan, mohon maaf aja, ini kan orang yang mendapatkan jabatan lewat mohon maaf, kriminalisasi. Nah, kira-kira yang mendapatkan partai dengan cara kriminalisasi itu dan pasti satu komunitas dengan Jokowi, kan gampang sekali membacanya," tuturnya.

Sebelumnya, Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra.

Said Didu dan Sri Rajasa diberi waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan terkait Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang diduga terlibat dalam isu penyadapan presiden.

"Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Budi Arie Sebut Gibran Mundur dari Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.30 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Betul (Gibran resmi mundur)," kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026)

Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya untuk memperjuangkan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Syahganda menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi Gibran untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN. Hal itu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026

NASIONAL

Rocky Gerung Singgung Ketua Partai dalam Isu Dugaan Makar

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 18.55 WIB

JAKARTA – Isu dugaan makar kembali menjadi sorotan setelah akademisi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, mengungkap adanya kabar mengenai seorang ketua partai politik yang disebut-sebut terlibat dalam pembicaraan berkaitan dengan dugaan upaya makar.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali melalui kanal YouTube Rhenald Kasali. Percakapan itu ditayangkan pada Senin, 9 November 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Rocky menyebut informasi mengenai keterlibatan seorang pimpinan partai mulai beredar di ruang publik.

Namun, ia tidak mengungkap identitas tokoh politik yang dimaksud maupun memberikan rincian mengenai pembicaraan yang disebut berkaitan dengan dugaan makar.

Rocky mengatakan, informasi itu mulai terungkap secara bertahap.

Ia menyebut adanya seorang ketua partai yang dikabarkan ikut dalam percakapan yang memiliki kaitan dengan persoalan tersebut.

Menurut Rocky, sosok yang dimaksud memiliki karakter kontroversial serta pengaruh besar dalam mengendalikan jaringan oligarki.

Meski demikian, ia tidak menyampaikan bukti ataupun petunjuk spesifik yang dapat memastikan identitas orang tersebut.

Selain menyinggung dugaan keterlibatan elite politik, Rocky turut menyoroti arah dan tujuan akhir dari rangkaian peristiwa yang berkembang.

Ia menilai publik mulai mempertanyakan siapa pihak yang berada di balik berbagai kejadian tersebut dan kepentingan apa yang hendak dicapai.

Rocky juga memperkirakan situasi politik dapat berkembang menuju konsolidasi di antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

Dalam kondisi demikian, ia mengingatkan adanya kemungkinan risiko terhadap saksi maupun tokoh yang memiliki informasi penting.

Ia menggambarkan situasi tersebut menggunakan istilah anything goes, yang merujuk pada keadaan ketika berbagai kemungkinan dapat terjadi di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Golkar Respons Gibran Mau Mundur dari Wapres: Harusnya Disampaikan Terbuka ke Publik

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.20 WIB

BANDA ACEH - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia merespons keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur dari jabatannya. Dia mengatakan niat itu seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski Gibran telah menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Doli menegaskan presiden tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau pun menolak pengunduran diri seorang wapres.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur, DPR menjadi salah satu institusi yang akan menyikapi dan menilai pengunduran diri tersebut.

"Nah justru kalau ya, kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi ya tentang pengunduran diri," pungkasnya.

Diketahui, Gibran bertemu Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya dari wapres. Pertemuan keduanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada, Selasa (10/11/2026) pagi.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazahnya.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mundur dari Partai Solidaritas Indonesia, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo Subianto

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.15 WIB

JAKARTA - Mundurnya tiga figur penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, dinilai bukan sekadar keputusan personal.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, langkah tersebut bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ketiganya mulai memilih merapat ke Presiden Prabowo Subianto ketimbang terus berada dalam barisan Politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Adi, keputusan mundur itu tidak terlepas dari perkembangan politik terkini yang dinilai semakin tidak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.25 WIB



BANDA ACEH -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghormati sikap Gibran Rakabuming Raka yang mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan melanjutkan langkah hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazah.

“Ya, kita kita hormati hak seseorang ya “untuk mencari keadilan”. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Namun demikian, Saan menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI secara paralel akan tetap mengakomodir semua usulan dari para Anggota DPR RI yang ingin menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

“Iya (secara paralel), enggak ada masalah kan?” kata Legislator NasDem ini.

Ditanya lebih jauh mengenai apakah usulan HMP dari sejumlah Anggota DPR sudah diserahkan ke meja Pimpinan DPR, Saan mengaku bahwa secara resmi belum ada hingga saat ini.

“Belum, belum ada. Sampai hari ini kita belum menerima apa usulan inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” tegas Saan.

Sementara itu, terkait apakah Pimpinan DPR RI sudah membahas sikap Gibran yang menyatakan bakal bertempur di PTUN terkait polemik ijazah SMA-nya, Saan mengaku belum ada pembicaraan itu di level pimpinan DPR.

Ia hanya menegaskan bahwa Pimpinan DPR pada prinsipnya hanya menunggu usulan resmi dari para anggota DPR terkait pemakzulan Gibran. Sebab, hal itu merupakan hak konstitusional dari para anggota untuk menyampaikan mengusulkan haknya, baik lewat HMP, interpretasi, interpelasi, dan lain-lain.

“Itu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming angkat bicara perihal pengunduran dirinya saat jumpa pers di Istana Wapres, petang tadi, 10 November 2026.

Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.

Putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," ungkapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Syahganda: Tidak Mungkin Prabowo Minta Gibran Fight di PTUN

Oleh Redaksi · 11 Nov, 10.54 WIB



BANDA ACEH -Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk terus memperjuangkan persoalan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Syahganda, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menilai langkah Gibran ke PTUN sudah tidak ada gunanya justru dapat dibaca sebagai gambaran sikap dan perhatian Presiden terhadap persoalan tersebut.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," ujar Syahganda dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Dia pun menilai tidak masuk akal apabila Prabowo justru menganjurkan Gibran kembali melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tegasnya.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," tegasnya.

Sebelumnya, Yusril menyatakan upaya Gibran membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui PTUN tidak lagi memiliki manfaat hukum. Sebab, putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat final dan materi perkara yang sama tidak dapat kembali dipersoalkan melalui jalur hukum lain.

Di sisi lain, Gibran sebelumnya mengaku mendapat saran dari Prabowo agar tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1.

Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran pada Selasa, 10 November 2026.

NASIONAL

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Rumah Dinas Wapres di Menteng Terpantau Sepi

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.27 WIB

BANDA ACEH - Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi, Selasa (10/11/2026) sore. Kondisi ini terlihat setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar Taman Suropati, tepat di depan rumdin Wapres, terpantau ramai lancar.

Selain itu, kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya terparkir di sekitar rumdin tidak terlihat hingga berita ini ditulis. Penjagaan di bagian luar kediaman juga tampak lengang.

Aktivitas masyarakat di sekitar rumdin Wapres pun relatif normal. Warga masih terlihat menjalankan kegiatan seperti biasa.

Diketahui, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik ijazahnya, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Hal itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan MK dan MA mengenai polemik ijazahnya.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” katanya

ACEH

Bupati Aceh Barat: Abdi Negara Adalah Pahlawan Masa Kini

Oleh Aceh Barat · 10 Nov, 21.02 WIB

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Aceh Barat, Selasa (10/11/26).

Dalam amanatnya, Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai perjuangan tersebut, menurutnya, harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mengisi kemerdekaan.

“Pahlawan adalah mereka yang dahulu berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawa, demi rakyat dan kesejahteraan bangsa,” ujar Tarmizi.

Ia menegaskan, makna kepahlawanan di masa kini tidak hanya tentang perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga diwujudkan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Masa Depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.12 WIB

BANDA ACEH - Masa depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah ditinggalkan tiga figur pentingnya menjadi tanda tanya.

Terlebih, PSI sebelumnya menunjukkan kepercayaan diri menghadapi Pemilu mendatang dengan target menembus parlemen hingga masuk tiga besar.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, mundurnya tiga elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menjadi tantangan serius bagi partai berlambang gajah tersebut untuk menjaga daya saing Politik.

Menurutnya, membangun partai politik agar kompetitif dan mampu lolos ke parlemen bukan perkara mudah.

Terlebih, ketiga figur tersebut selama ini menjadi salah satu pilar penting PSI.

"Kalau elite ini tidak lagi aktif di PSI, bagaimana partai ini akan kompetitif di masa mendatang. Ini yang saya sebut rumit serumit-rumitnya," kata Adi, Selasa, 10 November 2026.

Ia mengatakan, ambisi PSI untuk lolos ke parlemen, bahkan menargetkan posisi tiga besar, membutuhkan kerja politik dan konsolidasi yang tidak sederhana.

Kondisi semakin menantang karena tiga figur yang selama ini menjadi bagian penting kekuatan PSI justru memilih tidak lagi aktif di partai.

Adi pun menyoroti peran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokomotif utama yang diharapkan mampu menggerakkan mesin politik PSI.

"Tinggal kita tunggu bagaimana kerja politik yang akan diorkestrasi oleh Jokowi sebagai lokomotif utama meloloskan partai berlambang gajah ini ke parlemen untuk pertama kalinya," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

David Pajung Minta Publik Tak Buru-Buru Kaitkan Penyadapan Prabowo ke Jokowi: Belum Ada Pembuktian

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.52 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Cipayung Nusantara, David Pajung meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan jika Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengingatkan bahwa hingga kini belum ada pembuktian maupun keterangan dari penyidik yang mengungkap pihak di balik dugaan penyadapan tersebut.

"Jangan dikit-dikit apa-apa selalu larinya ke Solo. Dikit-dikit apa-apa, belum ada pembuktian, bahkan dari tim apa penyidik sendiri belum ada sesuatu yang disampaikan, ya sudah semua end-user dari sana," ujar David dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Dewan Jenderal Sadap Presiden, Ada Dalangnya?' di iNews, Selasa (10/11/2026).

Dia kemudian menyinggung pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto yang menyebut dugaan penyadapan tersebut diduga memiliki kaitan dengan pihak luar negeri. Menurutnya, pernyataan itu juga dapat memunculkan dugaan adanya keterlibatan pihak asing dalam persoalan tersebut.

"Maka dari satu baru satu statement singkat itu saja, saya bisa juga membangun indikasi atau pikiran-pikiran bahwa apa yang di-state oleh Pak Presiden berkali-kali ada londo ireng, ya. Ada londo ireng yang bermain dari luar menggunakan orang-orang kita sendiri di republik ini untuk menjadi aktor, kaki tangan," kata dia.

David juga menegaskan posisinya sebagai pendukung pasangan Prabowo-Gibran. Dia menginginkan pemerintahan keduanya dapat berjalan utuh selama lima tahun tanpa terganggu konflik Politik.

Menurutnya, konflik dan disharmoni politik berpotensi menggganggu pelaksanaan program pemerintahan. David berharap polemik dugaan penyadapan tidak berkembang menjadi spekulasi yang mengaitkan pihak tertentu tanpa bukti.

"Kepentingan kami sebagai relawan Prabowo-Gibran itu konteks kami memang harus mempertahankan kepemimpinan Prabowo-Gibran ini sampai 5 tahun. Utuh, bahkan jangan diganggu dengan riak-riak, dengan konflik-konflik politik, dengan disharmoni sosial politik yang menyebabkan kepemimpinan Prabowo-Gibran ini akan terseok-seok mengeksekusi programnya," kata dia.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Ini Kata Polisi

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.32 WIB



BANDA ACEH -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri (FB) periode 2019-2023 dikabarkan ditangkap oleh polisi.Informasi penangkapan tersebut mendadak ramai pada Rabu (11/11/2026) petang menjelang malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa informasi penangkapan tidak tepat.

Menurutnya tidak ada yang diamankan seperti informasi yang beredar.

"Tidak ada yang diamankan," jelasnya saat dikonfirmasi Rabu (11/11/2026) malam.

Kombes Budi menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi GOR Bulutangkis tempat di mana Firli Bahuri berolahraga.

"Kehadiran personel menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam dua kali panggilan pemeriksaan," terangnya.

Kemudian personel Ditreskrimsus PMJ mendapat keterangan dari FB bahwa akan hadir dalam pemanggilan berikutnya.

Namun belum diketahui pasti kapan pemeriksaan terhadap FB akan dilaksanakan.

"Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik," jelas Kombes Budi.

Sebelumnya, Tribunnews.com sudah mencoba menghubungi Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi terkait kabar penangkapan tersebut.

Namun, hingga saat ini Irjen Arie belum merespon pesan singkat maupun telepon dari Tribunnews.com tersebut.

Sementara itu, pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah kabar tersebut dan menyebut kabar penangkapan itu hoaks.

"Hoaks, hoaks. Enggak bener (soal Firli Bahuri ditangkap)" ucap Ian saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu malam.

Ia menyebut jika kliennya saat ini masih berada di kediamannya untuk memastikan kabar tersebut salah.

"Ada iya (di kediaman)," ucapnya.

LINGKUNGAN

Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 21.24 WIB

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan sungai yang terdampak bencana di Sumatera setelah puluhan kejadian banjir susulan kembali menghambat proses pemulihan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar normalisasi sungai menjadi prioritas utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa terdapat 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut selama periode April hingga Oktober 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Tito pada Senin (9/11/2026), kejadian banjir susulan itu terdiri atas 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat. Kondisi tersebut membuat upaya pemulihan infrastruktur menghadapi hambatan berulang karena sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak banjir.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan curah hujan, tetapi juga kondisi sungai yang masih mengalami sedimentasi. Material yang mengendap di aliran sungai dapat mengurangi kapasitas tampung air sehingga meningkatkan risiko luapan ketika hujan kembali turun.

Tito menyebut terdapat 137 sungai yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Presiden meminta agar pekerjaan normalisasi dipercepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir berulang.

Mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum yang dipaparkan dalam pemberitaan ANTARA pada 9 November 2026, penanganan 137 sungai tersebut masih menyisakan pekerjaan di berbagai daerah. Di Aceh, 15 sungai telah selesai dinormalisasi, enam masih dalam pengerjaan, dan 10 lainnya belum ditangani.

Sementara di Sumatera Utara, 28 sungai telah selesai dikerjakan, enam masih dalam proses, dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

BBPOM Aceh Dorong Keberlanjutan Program Keamanan Pangan di Aceh Besar

Oleh Redaksi · 10 Nov, 22.20 WIB

ACEH BESAR – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memperkuat sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan peduli terhadap keamanan pangan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar, Senin (9/11/2026).

Kepala BBPOM di Riyanto, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Besar dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan serta kolaborasi dalam pelaksanaan program keamanan pangan.

Ia menjelaskan bahwa penguatan keamanan pangan dilaksanakan melalui tiga program terintegrasi, yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah).

“Melalui ketiga program ini, kita sedang membangun ekosistem keamanan pangan yang dimulai dari keluarga, diperkuat di desa, diterapkan di pasar, dan dibudayakan di sekolah,” ungkap Riyanto.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan edukasi atau diperolehnya sertifikat, tetapi dari konsistensi masyarakat dalam menerapkan prinsip keamanan pangan hingga menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berharap para kader keamanan pangan dapat terus menjadi penggerak dan agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan, penganggaran, dan koordinasi lintas sektor juga sangat diperlukan agar program ini dapat berkelanjutan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketua Tim Program Prioritas Nasional, Desi Ariyanti Ningsih, memaparkan capaian dan hasil evaluasi pelaksanaan tiga program keamanan pangan di Aceh Besar.

Ia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi bertujuan mengukur pencapaian target, menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya.

“Melalui monitoring dan evaluasi ini, kita dapat melihat sejauh mana program telah berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar manfaat program dapat terus dirasakan masyarakat,” jelas Desi.

Pada Program Desa Pangan Aman, intervensi dilaksanakan di Desa Bueng Sidom, Kecamatan Blang Bintang. Kegiatan meliputi advokasi, pembentukan dan bimbingan teknis 12 Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), edukasi komunitas, serta fasilitasi sarana komunitas dan UMKM pangan.

Desi menyampaikan bahwa kader diharapkan semakin mandiri dalam melakukan pendampingan dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat. Pelaporan hasil fasilitasi dan pengujian pangan juga perlu ditingkatkan agar perkembangan program dapat dipantau.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Alumni 212 Sebut Jabatan Wapres Gibran Tak Sah sesuai Syariat Islam, Singgung Menipu Rakyat

Oleh Redaksi · 11 Nov, 11.02 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (Persada 212) Ahmad Shabri Lubis mengungkapkan, jabatan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat ini tidak sah dalam sudut pandang Islam buntut polemik ijazahnya.

Diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan terkait kepemilikan ijazah setingkat SMA yang dimiliki Gibran dalam persyaratan pencalonan sebagai Wakil Presiden.

Sementara, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi perkara keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dalam putusan bernomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran sebagai persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.

"Kalau dari sudut pandang Islam sudah pasti batal, maka otomatis jabatannya pun juga batal karena dihasilkan dari hasil yang batal," ujar Ahmad di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa, (10/11/2026).

Atas dasar dan alasan itu, desakan pemakzulan terhadap Gibran dinilai perlu dilakukan. Dia memastikan pembahasan pemakzulan ini akan dibahas dalam Ijtima Ulama, khususnya mengenai pandangan syariat Islam terhadap tindakan yang dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap masyarakat.

"Jadi, itu semua sudah harus diturunkan bahkan ya nanti kalau dalam Ijtima Ulama tadi sudah disampaikan oleh beberapa ulama, apa nih hukumnya kalau dalam syariat Islam model menipu seperti ini, menipu rakyat seperti ini," katanya.

Dia menjelaskan, hasil pertemuan pembahasan melalui Ijtima Ulama bersama tokoh nasional yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat akan diumumkan kepada publik. Dalam forum ini, para ulama dan tokoh nasional juga rencananya akan mengeluarkan sejumlah fatwa terkait polemik ijazah tersebut.

Terpisah, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Meski sudah menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatannya, dia mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan

NASIONAL

PK Gibran Tak Halangi Sidang Istimewa MPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 20.10 WIB



BANDA ACEH -Rencana Peninjauan Kembali (PK) yang akan diajukan Gibran Rakabuming Raka atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026, dinilai tidak dapat menghalangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

Menurut Teguh, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang tidak terlibat dalam perkara tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum PK.

"Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742," ujar Teguh dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.

Selain persoalan kedudukan hukum, Teguh menjelaskan bahwa pengajuan PK pada prinsipnya tidak menunda ataupun menghentikan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Menurut dia, rencana PK tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi MPR menggelar Sidang Istimewa sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

"MPR agar tidak membiarkan persoalan konstitusional berlarut-larut hingga memicu kekosongan hukum maupun Politik," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Teguh memandang pembiaran terhadap situasi tersebut berpotensi melahirkan persoalan baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

"Sidang Istimewa MPR telah menjadi keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak seharusnya ditunda," demikian Teguh menambahkan.

LINGKUNGAN

Semangat Hari Pahlawan, Peserta Pelatihan BBPVP Medan Praktik Pilah Sampah dan Olah Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aromaterapi

Oleh Explore Vipho GRAS · 10 Nov, 23.23 WIB

MEDAN – Semangat Hari Pahlawan Tahun 2026 tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Semangat tersebut terlihat dalam rangkaian kegiatan peserta Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Skala Rumah Tangga di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Selasa (10/11/2026).

Sebelum memulai kegiatan pelatihan, seluruh jajaran pegawai, instruktur, serta peserta pelatihan vokasi yang tengah mengikuti program pelatihan di BBPVP Medan terlebih dahulu mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026.

Kepala BBPVP Medan, Amran, S.T., bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus menyampaikan amanat kepada seluruh peserta upacara.

Dalam amanat tersebut, Kepala BBPVP Medan membacakan pesan dan arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Pesan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh elemen ketenagakerjaan untuk meneladani semangat pantang menyerah para pahlawan.

Di masa kini, perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras, inovasi, peningkatan kompetensi, serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa melalui peningkatan keahlian.

Setelah mengikuti upacara, peserta Pelatihan Pengelolaan Limbah Organik Skala Rumah Tangga melanjutkan kegiatan pembelajaran melalui praktik langsung pengelolaan sampah di lingkungan BBPVP Medan.

Dalam kegiatan praktik lapangan, para peserta melakukan pengamatan dan penghitungan volume sampah yang terdapat di bak penampungan sampah lingkungan BBPVP Medan. Setelah proses penghitungan, peserta melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik.

Sampah organik yang telah dipisahkan kemudian dikumpulkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Praktik ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta mengenai pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari mengetahui volume sampah yang dihasilkan, melakukan pemilahan, hingga menentukan metode pengolahan yang tepat.

Kegiatan tersebut didampingi oleh instruktur Velayati Nurrachma R. Melalui pendampingan instruktur, peserta mendapatkan pengalaman praktik mengenai tahapan pengelolaan limbah organik serta pemanfaatannya menjadi produk yang bermanfaat.

Tidak hanya melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik menjadi kompos, peserta juga mengembangkan kreativitas melalui praktik pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Anggota Dilarang Keluar Jakarta Jelang Paripurna Pemakzulan Gibran, Ini Kata Pimpinan DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 20.02 WIB



BANDA ACEH -Kabar yang beredar di media sosial mengenai larangan bagi anggota DPR RI bepergian ke luar Jakarta menjelang rapat paripurna terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, direspons Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Saan menegaskan, tidak ada kebijakan khusus yang melarang anggota DPR meninggalkan Jakarta.

Menurutnya, keberadaan anggota di ibu kota berkaitan dengan agenda masa persidangan yang sedang berlangsung.

"Itu kebijakan masing-masing. Karena kita memang di DPR ini kan sekarang masa sidang," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Ia menjelaskan, selama masa sidang, anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugas kedewanan, termasuk mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat di komisi masing-masing.

"Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang dengan sesuai dengan komisi masing-masing," tandasnya.

Adapun DPR RI akan menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) ratusan Anggota DPR RI pada Rapat Paripurna terdekat.

Berdasarkan jadwal, Rapat Paripurna DPR terdekat akan digelar pada Kamis besok, 12 November 2026

NASIONAL

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 13.49 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai sudah tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusi.

Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman menyusul langkah Gibran yang ingin kembali membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Arif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat mengikat sehingga harus menjadi perhatian dalam menyikapi status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Legislator NasDem ini bahkan menilai posisi Gibran saat ini bermasalah secara konstitusional dan secara moral tidak lagi layak menyandang jabatan Wakil Presiden.

"Tidak ada langkah lain selain mundur atau di mundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi di sebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi," tegasnya kepada wartawan, Rabu, 11 November 2026.

Atas dasar itu, Arif juga mendesak DPR segera mengambil langkah konstitusional dengan menggunakan hak yang dimiliki parlemen.

"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak SD hingga S1.

Gibran juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan peninjauan kembali (PK) ke MA.

"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran pada Selasa, 10 November 2026.

NASIONAL

Kasus Gibran Jadi Pelajaran Pentingnya Kompetensi Pejabat

Oleh Redaksi · 11 Nov, 14.24 WIB



Anak Sulung Joko Widodo alias Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pengingat bahwa jabatan publik harus diperoleh melalui proses yang benar serta didukung kompetensi, bukan sekadar ambisi atau berbagai alasan.

Pengamat Politik Hendri Satrio menilai isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran bahwa jabatan publik semestinya diraih melalui proses dan ditopang kompetensi, bukan dengan berbagai alasan.

Menurut Hensa, perbandingan Gibran dengan tokoh muda seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir semestinya tidak berhenti pada faktor usia, tetapi juga mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi.

"Dulu kan pada saat kampanye kan ada alasan-alasan bahwa bayangkan saja, seorang Gibran dibandingkan dengan Hatta, dibandingkan dengan Sjahrir, yang waktu itu masih muda-muda juga, ya nggak usah pakai alasan-alasan, tapi lihat kompetensinya, dan sangat disayangkan isu kemunduran dirinya ini juga gara-gara kompetensi," kata Hensa, Rabu, 11 November 2026.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu berpandangan, peristiwa ini harus menjadi pelajaran agar seseorang tidak dipaksakan menduduki jabatan sebelum dia benar-benar, meskipun ia anak presiden.

“Bila memang belum siap sebagai pejabat, walaupun dia anaknya presiden (Jokowi), harusnya si presiden lebih memahami untuk tidak memaksakan anaknya muncul ke permukaan sebelum dia siap,” kata Hensa.

Disisi lain, akademisi Universitas Paramadina ini juga menilai mundurnya Gibran ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa aturan tidak perlu diubah-ubah hanya untuk mendongkrak seseorang.

Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia capres-cawapres melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Pelajaran selanjutnya adalah tidak perlu mengubah-ubah aturan untuk mendongkrak atau mendorong seseorang," ujarnya.

NASIONAL

Tok! Fraksi PDIP Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk Pemakzulan Gibran!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 13.45 WIB



BANDA ACEH -Fraksi PDIP DPR RI sepakat menempuh jalur konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto mengatakan, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota. Sebanyak delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.

Utut menegaskan, keputusan fraksi bukan didasarkan pada penghitungan jumlah anggota yang mengusulkan HMP, melainkan sikap Politik untuk menggunakan mekanisme konstitusi.

"Pertama ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat,” tegas Utut kepada wartawan usai rapat pleno Fraksi PDIP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Saat ditanya mengenai jumlah anggota Fraksi PDIP yang siap mendukung langkah tersebut, Utut menyebut seluruh 110 anggota dapat dilibatkan apabila diperlukan.

"Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110 (Anggota DPR Fraksi PDIP),” katanya.

Namun demikian, Utut memastikan bahwa seluruh anggota fraksi telah menyepakati keputusan politik tersebut.

"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header demokrasi, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya,” pungkasnya.

NASIONAL

Diisukan Jadi Wapres Gantikan Gibran, Ini Kata Maruarar Sirait

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.52 WIB



Presiden Prabowo Subianto (depan), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (belakang). FOTO/Net.

BANDA ACEH – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membantah isu yang menyebut dirinya bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.

Maruarar menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

“Hahaha, itu mana mungkin ya. Tahu diri. Eh, saya tuh apa sih gitu ya?” ujar Maruarar kepada awak media, Rabu (11/11/2026).

Ia kembali menegaskan bahwa kabar mengenai dirinya yang akan menjadi Wapres merupakan informasi bohong.

Maruarar mengatakan saat ini dirinya memilih untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai Menteri PKP.

“Nggak ada itu (isu menjadi Wapres), bohong gitu ya. Nggak ada itu, ya. Nggak benar, saya kerja fokus,” tegasnya.

Sebagai informasi, isu mengenai kemungkinan Maruarar Sirait menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden belakangan ramai diperbincangkan warganet di media sosial.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dibenarkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam.

Di tengah polemik dokumen pendidikan dan putusan Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.

NASIONAL

PKS Jelaskan Alasan HNW Mundur dari Waka MPR: Dapat Tugas Baru sebagai BKSAP

Oleh Redaksi · 11 Nov, 00.55 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR karena mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR.Penugasan tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

"PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan," ujar Kholid kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026) malam.

Kholid menjelaskan, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan.

Gibran Putuskan Maju PTUN, PKS-Golkar: Bismillah Hak Menyatakan Pendapat Lanjut

Oleh karena itu, kata dia, PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Menurutnya, hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk dunia Islam, perlu diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama dan langkah diplomasi yang konkret.

Pada saat yang sama, Kholid menyampaikan, jangkauan diplomasi harus terus diperluas kepada seluruh negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional," kata Kholid.

Lebih jauh, Kholid menyebut, penguatan diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada hasil yang nyata, yakni perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

"Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya," jelasnya.

Sementara itu, Kholid menyampaikan penghargaan atas pengabdian HNW selama menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR.

"PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia," kata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Denny Indrayana Ingatkan Gibran soal Tetap Fight di PTUN: Sikap Prabowo Jangan Dimaknai Menolak Dia Mundur

Oleh Redaksi · 11 Nov, 10.58 WIB



BANDA ACEH - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengingatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tidak salah menafsirkan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait niat pengunduran dirinya. Dia menilai, sikap Prabowo yang mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum bukan berarti memberikan izin untuk tetap menjabat sebagai wakil presiden.

Pernyataan Denny merespons sikap Gibran yang menyatakan akan berjuang (fight) untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Jadi jangan sampai ada manipulasi di sini, apa yang menjadi sikap sopan santun dari Presiden Prabowo dimaknai sebagai sikap mengizinkan untuk tidak mundur dan menolak mundur," kata Denny, Selasa (10/11/2026).

Denny menambahkan, Prabowo merupakan sosok yang tidak ingin membuat orang lain merasa tidak nyaman saat berinteraksi. Karena itu, sikap Prabowo yang mempersilakan Gibran menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya tidak serta-merta berarti menolak niat pengunduran diri tersebut.

"Jadi kalau kemudian saudara Gibran saya ingin ke PTUN, ya mungkin pak Prabowo mengatakan silakan. Tapi bukan berarti niat pengunduran dirinya ditolak," ujarnya.

Lebih lanjut, Denny menilai Gibran seharusnya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi bentuk kepatuhan terhadap konstitusi.

Dia mendasarkan pandangannya pada dua putusan, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Denny pun meminta Gibran menunjukkan ketegasan dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

"Kita tunggu saudara Gibran betul-betul tampil dengan ketegasannya, dengan sikap yang kita tunggu-tunggu menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden," ucapnya.

"Kenapa demikian? Karena sudah ada putusan MK dan MA. Putusan MA dan MK ini adalah putusan yang saya ibaratkan, supaya mudah dipahami, putusan langit ketujuh. Jadi tidak ada langit di atas langit ketujuh," tuturnya

ACEH

Komunitas Cahaya Inoeng Dorong Perempuan Jadi Penggerak Keluarga Sehat

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.36 WIB

BANDA ACEH – Komunitas Cahaya Inoeng (KCI) menggelar Kajian Umum sekaligus Soft Launching dengan tema "Sehat Ala Rasulullah SAW" di Meunasah Baburrahman, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Ustadz Febri Sugianto, praktisi kesehatan herbal dan pakar Thibbun Nabawi dari Bogor, sebagai narasumber utama.

Turut hadir Owner Rumoh Bieng, Aral Yusni, para pimpinan Majelis Taklim, pengurus TP PKK Gampong, kader Posyandu, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Kehadiran KCI diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan nilai keislaman, dan kepedulian sosial.

Ketua Komunitas Cahaya Inoeng, Santi Zuhra, SHI, mengatakan KCI dibentuk sebagai ruang bagi perempuan untuk belajar, mengembangkan potensi, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin Cahaya Inoeng menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, berkarya, dan saling menguatkan. Perempuan yang berilmu akan melahirkan keluarga berkualitas, perempuan yang sehat memperkuat ketahanan keluarga, dan perempuan yang berdaya menjadi penggerak kemajuan masyarakat," ujar Santi.

Santi mengatakan, nama Cahaya Inoeng memiliki filosofi yang mencerminkan harapan besar terhadap peran perempuan Aceh.

Kata Cahaya melambangkan ilmu pengetahuan, harapan dan kebermanfaatan. Sementara Inoeng, yang berarti perempuan dalam bahasa Aceh, menggambarkan perempuan yang beriman, berilmu dan mandiri, tangguh dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya, KCI akan mengembangkan kegiatan pendidikan keislaman, kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, parenting, serta kepedulian sosial.

Santi juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Majelis Taklim, Posyandu, TP PKK, KWT, dan berbagai komunitas perempuan agar program yang dijalankan memberikan manfaat lebih luas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Indonesia Siapkan Skema Baru Biayai Konservasi 13 Taman Nasional

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 20.05 WIB

ANTALYA – Pemerintah Indonesia mulai menjajaki model pembiayaan baru untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Langkah tersebut diperkenalkan melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).

Rencana pembiayaan tersebut menyasar 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Pemerintah berupaya memperluas sumber pendanaan dengan melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, filantropi, serta mitra internasional.

Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan perlindungan kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan pola pendanaan konvensional. Menurutnya, dibutuhkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan agar upaya pelestarian alam dapat berjalan dalam jangka panjang.

Indonesia sendiri memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, penguatan pendanaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam forum COP31, Satgas juga memperkenalkan rancangan White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle yang dirancang untuk menghimpun, mengonsolidasikan, dan menyalurkan dana dari berbagai sumber.

Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pemberian insentif bagi pengelola taman nasional untuk mengembangkan sumber …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Projo Ingatkan Prabowo-Gibran Satu Kesatuan di Tengah Isu Pengunduran Diri Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 00.27 WIB



BANDA ACEH - Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan. Keduanya disebut telah bersama sejak mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, memenangkan kontestasi, hingga kini menjalankan kepemimpinan nasional.Menurut Freddy, hubungan tersebut menjadi alasan penting bagi Gibran untuk berdialog langsung dengan Prabowo ketika menghadapi dinamika Politik yang berkembang belakangan ini. Ia menilai pertemuan kedua pimpinan negara itu harus dipahami sebagai komunikasi antara presiden dan wakil presiden, bukan semata-mata dikaitkan dengan isu pengunduran diri.

"Yang paling utama di situ adalah diskusi kedua pemimpin tertinggi bangsa yang merupakan satu kesatuan sebelum pilpres, saat pilpres memenangakan, dan sekarang setelah berjalan dua tahun," kata Freddy dikutip dari Kompas Petang, Selasa (10/11/2026).

Freddy menyebut wajar apabila Gibran menemui Prabowo untuk membicarakan situasi politik terkini. Terlebih, keduanya merupakan pasangan yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan setelah memenangkan Pilpres 2024.

Pernyataan Freddy tersebut disampaikan di tengah perhatian publik terhadap kabar Gibran berniat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan pengunduran diri secara formal dari putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Freddy mengungkapkan bahwa kelompok pendukung Gibran memang mendapatkan informasi mengenai niat tersebut. Meski demikian, pertemuan Gibran dengan Prabowo pada Selasa pagi disebut baru sebatas dialog dan penyampaian maksud, bukan pengajuan resmi untuk melepaskan jabatan wakil presiden.

"Jadi secara formal belum ada Wapres Gibran untuk mundur, ini yang sering disalahartikan," ujar Freddy.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam situasi politik yang dinamis, Gibran perlu meminta petunjuk kepada Prabowo sebagai presiden. Hal itu termasuk menyampaikan niatnya untuk mundur kepada kepala negara.

"Jadi ketika ada sekali lagi ketika ada dinamika politik yang begitu kencang, jadi menurut tata krama konstitusi segala maca, Wapres Gibran memang harus meminta petunjuk dari Presiden, termasuk menyampaikan niatnya untuk mundur," kata Freddy.

Projo menekankan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran perlu dilihat sebagai bagian dari komunikasi kedua pemimpin negara. Freddy meminta pernyataan Istana mengenai niat pengunduran diri Gibran tidak disalahartikan sebagai pengajuan pengunduran diri yang sudah dilakukan secara formal.

NASIONAL

AHY vs Anies, Siapa Paling Kuat Gantikan Gibran?

Oleh Redaksi · 11 Nov, 10.49 WIB



BANDA ACEH -Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, jika Presiden Prabowo Subianto harus menentukan pengganti. Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai AHY dan Anies Baswedan menjadi dua tokoh yang paling layak dipertimbangkan karena elektabilitas keduanya cenderung meningkat, sementara nama lain relatif rendah.

“Jadi, dilihat dari penerimaan publik, AHY dan Anies paling layak untuk diajukan menjadi wapres,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.

Namun, jika harus memilih di antara keduanya, Prabowo diperkirakan lebih condong kepada AHY. Selain dinilai memiliki kinerja yang relatif memuaskan Presiden, AHY juga berada dalam gerbong politik Prabowo di Koalisi Merah Putih.

Kedekatan Prabowo dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut menjadi pertimbangan. Menurut Jamiluddin, hubungan tersebut dapat membuat Prabowo lebih nyaman jika didampingi AHY.

“SBY dinilai menjadi garansi bahwa AHY akan tetap loyal kepada Prabowo baik saat suka maupun duka,” ujarnya.

Meski demikian, Jamiluddin menilai peluang AHY bukan tanpa pesaing. Prabowo bisa saja memilih Ketua DPR Puan Maharani sebagai pengganti Gibran demi membuka jalan bagi PDI Perjuangan masuk ke lingkar kekuasaan.

Menurutnya, pilihan tersebut sejalan dengan politik akomodatif yang selama ini dianut Prabowo. Namun, jika Puan dipilih menjadi wapres, kemungkinan ada pertukaran kepentingan politik yang menyertainya.

“Barternya Puan menjadi wapres tapi Ketua DPR diberikan ke Gerindra. Bisa jadi pengganti Puan diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad,” kata Jamiluddin.

Kalkulasi itu, lanjutnya, berkaitan dengan keinginan Prabowo agar DPR lebih kooperatif terhadap pemerintah. Meski AHY dinilai lebih berpeluang, keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan politik Prabowo.

SEJARAH

Sekcam Peukan Bada Jadi Narasumber, Promosikan Cagar Budaya, Wisata, dan Sejarah kepada Mahasiswa ISBI Aceh

Oleh Hamdani · 10 Nov, 20.52 WIB

JANTHO - Peduli sejarah, cagar, dan seni budaya, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Peukan Bada, Rusydi SAg MPd menjadi narasumber dalam kegiatan bersama mahasiswa Program Studi (Prodi) Kajian Sastra dan Budaya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dengan memperkenalkan potensi cagar budaya, wisata, serta sejarah yang terdapat di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Minggu 8 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sekcam Peukan Bada memperkenalkan sejumlah situs bersejarah yang memiliki nilai penting bagi perjalanan sejarah dan kebudayaan Aceh.

Di antaranya adalah tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien, Balee Ikrar Lamteh, serta Makam Tgk. Chik Maharaja Gurah.

Melalui pemaparan tersebut, mahasiswa ISBI Aceh diajak untuk mengenal lebih dekat kekayaan sejarah dan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Peukan Bada.

Sekcam Peukan Bada menyampaikan bahwa berbagai situs sejarah tersebut bukan hanya menjadi saksi perjalanan masa lalu, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi.

Menurutnya, pengenalan cagar budaya kepada kalangan mahasiswa merupakan salah satu langkah penting dalam menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian warisan sejarah dan budaya daerah.

Ia juga berharap mahasiswa ISBI Aceh dapat ikut berperan dalam memperkenalkan potensi wisata sejarah Peukan Bada melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dokumentasi, serta kreativitas seni dan budaya.

"Peukan Bada memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang patut kita jaga bersama. Kami berharap generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat mengenal, mencintai, serta ikut mempromosikan warisan sejarah ini agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas," ungkapnya.

Kegiatan ini ldiharapkan menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah kecamatan dan kalangan akademisi, sekaligus mendorong pelestarian cagar budaya serta pengembangan wisata berbasis sejarah dan kearifan lokal di Kecamatan Peukan Bada.

Koordinator Program Studi (Prodi) Kajian Sastra dan Budaya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Muhammad Tahir MS didampingi humas ISBI Aceh, Muhammad Zacky MPd mengatakan kegiatan ini bertajuk Rihlah Budaya Mahasiswa ISBI Aceh.

"Melalui kegiatan rihlah budaya mahasiswa ISBI Aceh diharapkan mereka akan melek sejarah, cagar dan budaya di Aceh, terutama di Aceh Besar khususnya di Kecamatan Peukan Bada yang kita kunjungi dalam kesempatan ini, "katanya.

"Para mahasiswa sangat menikmati kegiatan rihlah budaya ini dan mereka akan menulis tentang perjalanan selama kegiatan rihlah budaya, "tutupnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Sampaikan Surat Pengunduran Diri, Besok Diserahkan ke DPR

Oleh Redaksi · 11 Nov, 19.52 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka malam ini (11/11/2016) menemui Presiden Prabowo.

Informasi yang didapat monitorindonesia.com, Wakil Presiden Gibran akan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Malam ini ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran. Agendanya penyerahan surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres,” kata sumber monitorindonesia.com, Rabu malam (11/11/2026).

Besok (Kamis, 12/11/2026), surat pengunduran diri Gibran akan disampaikan ke DPR RI.

“Rencananya, surat pengunduran diri akan diserahkan ke DPR RI,” ujar sumber itu.

Sumber itu mengatakan, sediannya rapat paripurna DPR RI yang salah satu agendanya adalah mengumumkan hasil pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Dari informasi yang didapat oleh monitorindonesia.com, jadwal rapat paripurna diundur menjadi pukul 14.00 WIB.

“Awalnya rapat paripurna pukul 10.00 WIB tapi diundur menjadi pukul 14.00 WIB karena pagi besok DPR RI akan menerima surat pengunduran diri Wapres Gibran. Makanya Rapat Paripurna diundur,” kata sumber tersebut

NASIONAL

Effendi Gazali Soroti Kasus Penyadapan Presiden: Sidang Etik Dulu, Copot Pangkat!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.58 WIB



BANDA ACEH - - Pakar komunikasi Politik Effendi Gazali menyoroti belum digelarnya sidang etik terhadap perwira tinggiPolri yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai proses sidang etik tersebut seharusnya segera dilakukan agar pemeriksaan berlangsung setara.

Hal itu disampaikan Effendi saat menjadi narasumber dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Dewan Jenderal" Sadap Presiden, Ada Dalangnya? di iNews, Selasa (10/11/2026).

Awalnya, Effendi mempertanyakan lambatnya proses penanganan perkara tersebut, termasuk pelaksanaan sidang etik terhadap para tersangka termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

"Karena itu pembuktiannya nanti adalah ini betul-betul ini kalau dalam hal ini saya setuju, terlalu lambat ini. Terlalu pelan. Sidang etiknya sudah belum? Sudah, ya? Belum?" tanya Effendi.

Effendi menilai para tersangka seharusnya lebih dahulu menjalani sidang etik hingga dilakukan pencopotan pangkat. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung setara tanpa dipengaruhi perbedaan pangkat di lingkungan kepolisian.

"Kan harusnya sidang etik dulu, dicopotin pangkat-pangkat itu. Jadi dalam sidang itu perlakuannya bisa setara. Enggak main bintang lagi, kan? Ada bintang empat, saya yang periksa bintang tiga misalnya, gitu kan jadi tidak setara," ucapnya.

Dia menilai, pencopotan pangkat sebelum pemeriksaan dapat memberikan kesempatan bagi proses penanganan perkara yang lebih setara.

Selain menyoroti sidang etik, Effendi juga mempertanyakan mengapa dugaan penyadapan tersebut hanya mengemuka pada unsur kepolisian, sementara terdapat lembaga intelijen lain yang juga memiliki fungsi pengawasan.

Dia juga menegaskan bahwa dugaan penyadapan oleh kepala kepolisian terhadap presiden merupakan persoalan serius yang menurutnya dapat dikategorikan sebagai makar.

"Kenapa hanya kepala kepolisiannya yang lagi hobi menyadap presiden? Ketika terjadi hipotesis itu, kenapa badan intelijen yang lain, ya? Misalnya dari TNI yang juga sedang melihat?" tuturnya

NASIONAL

Golkar soal Niat Resign Gibran: Keputusannya Bukan di Pak Presiden!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.28 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak cukup hanya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jika benar terjadi, proses tersebut tetap harus disikapi DPR, bukan ditentukan oleh Presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia merespons pernyataan Istana mengenai niat Gibran mengundurkan diri.

“Keputusannya bukan di Pak Presiden. Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Selasa, 10 November 2026.

Menurutnya, jika pengunduran diri itu benar terjadi, DPR harus menilai dan menyikapinya. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara pasti posisi pengunduran diri Gibran, termasuk apakah ada surat resmi yang disampaikan.

“Kita belum lihat suratnya apa ada benar ada apa enggak,” ujarnya.

Di sisi lain, Doli menyebut komunikasi lintas fraksi terkait penggunaan hak menyatakan pendapat terus berlangsung setelah masa sidang DPR dimulai. Ia memastikan sudah ada anggota Partai Golkar yang mengajukan hak tersebut.

“Dari hasil monitor dan komunikasi dari teman-teman lintas fraksi sampai sejauh ini teman-teman ada terus yang menyampaikan keinginannya untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat oleh DPR,” jelasnya.

Doli juga mengonfirmasi bahwasannya sudah ada anggota Golkar yang mengajukan usulan tersebut.

“Ada.” singkatnya.

Doli menilai DPR tidak bisa berdiam diri menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan Gibran. Menurutnya, setelah proses hukum selesai, tindak lanjutnya menjadi perhatian publik terhadap DPR.

“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah tertinggi kita,” tegasnya.

Ia pun menyatakan berpeluang ikut menggunakan hak menyatakan pendapat. Saat ditanya apakah akan ikut menandatangani usulan tersebut, Doli menjawab, “Insya Allah.”

HIBURAN

KKP Berdalih Soal Kontrak Belanja Influencer Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 10 Nov, 18.53 WIB



BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdalih soal kerja sama publikasi bernilai miliaran rupiah dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan dalam ekosistem bisnis pesohor Raffi Ahmad.

KKP menyatakan, pelibatan influencer dan kreator konten merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menjangkau masyarakat secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah belanja publikasi KKP melalui perusahaan milik Raffi Ahmad itu menjadi sorotan publik. Kementerian mengakui kritik dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.

"Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku," demikian keterangan resmi KKP, Selasa (10/11/2026).

KKP beralasan, publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas pokok kementerian untuk menyampaikan kebijakan strategis, program prioritas, hingga capaian kinerja kepada masyarakat.

Untuk itu, KKP mengklaim menerapkan strategi komunikasi multi platform. Skema tersebut tidak hanya mengandalkan influencer atau kreator konten digital, tetapi juga memanfaatkan media cetak, televisi, media …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pimpinan DPR Terima Pengusul Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran, Ada Keponakan Prabowo

Oleh Redaksi · 11 Nov, 14.31 WIB



BANDA ACEH - Anggota DPR sekaligus pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden (Wapres) bertemu dengan pimpinan DPR. Salah satu anggota yang hadir di antaranya dari Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono.

Hal ini diketahui setelah Budi turut hadiri rapat pimpinan DPR RI yang menerima para pengusul HMP di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Budi tiba di ruang rapat sekitar pukul 13.30 WIB. Dengan kenakan batik cokelat, dia disambut oleh para legislator lain pengusul HMP. Setelahnya, dia menuju kursi yang telah disediakan.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal. Saan menerengkan, HMP merupakan salah sati hak legislator yang telah diatur dalam konstitusi.

"Mengingat rapat ini dalam rangka menerima usulan penyampaian hak menyatakan pendapat anggota, saya meminta persetujuan para pimpinan DPR RI dan anggota pengusul, apakah rapat ini dapat kita nyatakan bersifat terbuka?" kata Saan

EKONOMI

APEC Melangkah Lagi, Tiongkok adalah Kekuatan Kepastian Paling Andal dalam Kerja Sama Asia-Pasifik

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.39 WIB

Pada November 2026, Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 akan digelar di Shenzhen. Ini adalah kali ketiga Tiongkok menjadi tuan rumah APEC, dua belas tahun setelah Pertemuan Beijing 2014. Dalam dua belas tahun itu, lanskap Asia-Pasifik telah berubah secara mendalam; unilateralisme dan proteksionisme berulang kali mengemuka, dan risiko pemutusan rantai pasok secara artifisial terus meningkat. Pada momen seperti ini, Tiongkok kembali mengambil tongkat estafet APEC dan menyampaikan sinyal yang jelas: ketika kerja sama Asia-Pasifik berada di persimpangan jalan, Tiongkok memilih membuka pintu, bukan membangun tembok; memilih bergandengan tangan, bukan melepaskan.Pada 2025, total nilai ekspor-impor Tiongkok dengan ekonomi anggota APEC lainnya mencapai 26,29 triliun yuan, mencakup 57,82% dari total nilai perdagangan luar negeri Tiongkok. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, skala perdagangan ini secara kumulatif mencapai 125,49 triliun yuan, tumbuh 39,4% dibandingkan periode Rencana Lima Tahun ke-13.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pakar Hukum: Kalau Gibran Mau Mundur Jangan Sekadar Niat, Tapi Beneran!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.32 WIB



BANDA ACEH -Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai harus segera diperjelas, agar tidak menimbulkan ketidakpastian Politik di lingkungan pemerintahan.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menilai, pernyataan mengenai niat mundur yang belum diikuti keputusan resmi justru dapat menimbulkan kesan keraguan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

"Ini kan masih belum jelas. Dan ngapain disampaikan pada publik kalau hanya sekadar niat. Karena sekadar niat kan nggak ada implikasinya apa-apa secara hukum," kata Suparji kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Menurutnya, meskipun belum memiliki konsekuensi hukum, pernyataan tersebut dapat menimbulkan dampak politik yang kurang baik.

"Cuma itu implikasinya secara politis kan menjadi tidak bagus. Akhirnya kesannya menjadi setengah hati. Karena punya niat mundur, nanti tidak fokus. Karena ada keraguan antara maju dan mundur," ujarnya.

Suparji menegaskan, seorang pejabat negara harus memiliki kepastian sikap dalam menjalankan tanggung jawabnya. Apalagi, jabatan Wakil Presiden memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Karena itu, lanjut dia, Gibran perlu menentukan sikap secara tegas apabila memang memiliki keinginan untuk meninggalkan jabatannya.

"Maka harus dipastikan. Kalau mundur ya jangan sekadar niat. Mundur beneran," tegasnya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, pada Selasa pagi tadi, 10 November 2026.

Namun, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Namun menurut Suparji, selama belum ada keputusan resmi, niat pengunduran diri tersebut tidak mengubah kedudukan hukum Gibran sebagai Wakil Presiden.

NASIONAL

Peluang Gibran Bertahan Lewat PTUN Dinilai Terbatas

Oleh Redaksi · 11 Nov, 10.52 WIB



BANDA ACEH -Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menghadapi sejumlah hambatan hukum.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan tiga pengecualian, yakni adanya novum atau bukti baru, terdapat dua atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, serta untuk mempertahankan kepentingan keperdataan atau aset negara/daerah.

Dalam konteks putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Didik menilai peluang pengajuan PK oleh Kemendikdasmen sangat terbatas.

Pasalnya, Kemendikdasmen merupakan pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Selain itu, objek sengketa menyangkut keabsahan keputusan administrasi penyetaraan pendidikan individu, bukan persoalan aset negara atau daerah.

"Dan hingga saat ini tidak ada indikasi publik tentang adanya novum atau konflik putusan BHT yang relevan," ujar Didik lewat akun X miliknya, Rabu, 11 November 2026.

Menurutnya, Kemendikdasmen hanya dapat mengajukan PK apabila mampu membuktikan secara ketat salah satu dari tiga pengecualian yang diatur MA.

"Kunci keberhasilannya terletak pada satu hal, interpretasi yang sangat restriktif terhadap ketiga pengecualian tersebut," jelasnya.

Dengan demikian, Didik berpandangan putusan kasasi MA pada prinsipnya telah final. Ruang bagi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK masih terbuka secara terbatas, sepanjang memenuhi persyaratan pengecualian tersebut.

NASIONAL

Hanura Sarankan Gibran Mundur Karena Jauh Lebih Terhormat

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.35 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella menyarankan Gibran Rakabuming Raka untuk berjiwa besar untuk memilih jalan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.Hal ini dilakukan demi menjaga marwah pribadi, sekaligus memprioritaskan kepentingan stabilitas bangsa dan Negara. Daripada, Gibran yang juga putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, harus menempuh proses pemakzulan (impeachment) di parlemen.

“Lebih baik Gibran Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini jauh ke ih lebih terhormat dan bermartabat daripada dimakzulkan yang akan menguras energi Bangsa ini," tegas Rio, di sela sela Agenda Konsolidasi Tim Task Force DPP Partai Hanura dengan DPD, DPC dan anggota Dewan Se-Provinsi Papua Selatan di Merauke pada Selasa, 10 November 2026.

Sebaliknya, ila Gibran berani mengambil keputusan besar untuk melepaskan jabatannya demi mengakhiri kegaduhan, publik justru akan menaruh rasa hormat yang mendalam.

"Jika Mas Gibran memilih mundur secara ksatria demi menyelamatkan jalannya roda pemerintahan dan mendinginkan suhu Politik nasional, sejarah akan mencatatnya sebagai seorang negarawan sejati. Ini akan membuktikan bahwa generasi muda berani bertanggung jawab, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan rela berkorban demi masa depan republik," jelas Rio.

Sebagaimana diketahui, sesakan pengunduran diri ini menguat menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok.

Melalui vonis tersebut, MA secara resmi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah SMA luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.

NASIONAL

Netizen Berharap Prabowo Tolak Gibran Mundur: Enak Banget!

Oleh Redaksi · 11 Nov, 00.32 WIB



BANDA ACEH - Kabar mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya platform X.

Seorang warganet dengan akun @Qeenfl*** berharap Presiden Prabowo menolak pengunduran diri tersebut. Menurutnya, mundur dari jabatan Wapres justru akan terlalu menguntungkan bagi Gibran. Ia pun mendorong agar proses pemberhentian dilakukan melalui mekanisme pemakzulan di DPR.

"Semoga pak prabowo nolak, terus makzulkan aja di DPR, enak banget mundur," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (10/11).

Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas bagi mantan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat yang menjadi dasar pemberian hak pensiun dan sejumlah fasilitas. Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat dapat berdampak pada hilangnya hak-hak tersebut

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo membenarkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut disebut berjalan selama kurang lebih dua setengah jam.

Dalam kesempatan itu, Gibran dikabarkan mengutarakan niat untuk mundur dari kursi Wapres di tengah berbagai persoalan yang mencuat menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujar Pras aat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut. Menurutnya, dalam pertemuan itu Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

NASIONAL

Yusril Siap Bantu Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Saya Akan Carikan Jalan

Oleh Redaksi · 11 Nov, 00.36 WIB



BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan siap membantu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Yusril bahkan bersedia mencarikan jalan terkait mekanisme pengunduran diri jika Gibran meminta bantuan kepadanya.Pernyataan tersebut disampaikan Yusril ketika ditanya mengenai kabar Gibran yang menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku tidak berada dalam posisi untuk memberikan saran maupun nasihat kepada Wakil Presiden dalam situasi tersebut.

“Andai kata beliau mengatakan bagaimana cara mundurnya, saya akan carikan jalan," ungkap Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Yusril belum menyebut adanya permintaan langsung dari Gibran untuk membantu proses pengunduran diri. Kesediaannya tersebut masih sebatas apabila Wakil Presiden membutuhkan bantuan mengenai mekanisme yang harus ditempuh.

Di sisi lain, Yusril mengaku belum mendapatkan konfirmasi mengenai perkembangan pertemuan antara Prabowo dan Gibran. Ia pun berencana menemui Menteri Sekretaris Negara dan Presiden untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo. Informasi tersebut disampaikan Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Prasetyo, pembicaraan tersebut berlangsung dalam pertemuan empat mata antara Prabowo dan Gibran. Pertemuan keduanya disebut berlangsung selama sekitar 2,5 jam.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ucap Prasetyo kepada awak media di Istana.

Hingga kini, informasi mengenai niat pengunduran diri tersebut belum berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya. Pernyataan Yusril juga belum menunjukkan adanya proses pengunduran diri yang sudah berjalan.

NASIONAL

Pengamat sebut dari Niat Gibran Mundur dengan Sendirinya Gugur Menjadi Wapres

Oleh Redaksi · 11 Nov, 00.41 WIB



BANDA ACEH - Pengamat komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Presiden Prabowo Subianto seharusnya menerima niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya.Menurut Jamiluddin, ada dua pertimbangan yang menjadi alasan Presiden Prabowo tidak perlu menolak keinginan Gibran tersebut.

Pertama, Jamiluddin menilai Gibran sudah tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.

Ia merujuk pada persoalan ijazah pendidikan menengah Gibran yang disebutnya telah diputuskan Mahkamah Agung (MA). Menurut Jamiluddin, ijazah SLTA merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden.

"Karena itu, Gibran dengan sendirinya gugur menjadi wapres. Atas dasar ini, tidak ada alasan apa pun bagi Prabowo untuk menolak niat Gibran mundur," kata Jamiluddin dalam keterangannya kepada WARTA EKONOMI.

Kedua, Jamiluddin menilai keinginan Gibran untuk mundur juga sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat.

Ia menunjuk sejumlah demonstrasi yang membawa tuntutan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden sebagai indikasi adanya desakan publik.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, seorang pemimpin harus bersedia mendengarkan suara rakyat, termasuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pengunduran diri Gibran.

"Karena itu, Prabowo seharusnya mendengarkan sungguh-sungguh kehendak rakyatnya. Wujudnya tentu menerima niat Gibran untuk mundur," ujarnya.

Jamiluddin berpandangan, pengunduran diri Gibran justru akan memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Ia bahkan menyebut mundurnya Gibran dapat menjadi kado sekaligus kemenangan bagi demokrasi di Indonesia.

"Rakyat Indonesia menunggu pengunduran diri Wapres Gibran secepatnya. Rakyat akan bersuka cita menerimanya," kata Jamiluddin.

ACEH

10 BERITA

ACEH

Buka Lomba SJS DWP Aceh, Kak Na Imbau Kaum Bapak Stop Merokok

Oleh Redaksi · 11 Nov, 22.48 WIB



BANDA ACEH – Senam Jantung Sehat merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan jantung pribadi dan keluarga. Namun, upaya menjaga kesehatan jantung keluarga juga menuntut kerja sama kaum bapak, salah satunya adalah dengan stop merokok di rumah.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Marlina Usman, dalam sambutannya saat membuka secara resmi Lomba Senam Jantung Sehat seri III antar DWP Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Instansi Vertikal, di Aula DWP Aceh, Rabu (11/11/2026).

"Jangan sampai kaum ibunya sudah rutin mengikuti senam jantung sehat tapi bapaknya malah merokok di rumah, tentu kan jadi tidak sehat. Untuk itu, semua pihak harus memahami bahwa menjaga kesehatan jantung keluarga bukan semata mengikuti senamnya, tetapi juga menjaga pola hidup sehat di tingkat keluarga, termasuk stop kebiasaan merokok," kata Kak Na berpesan.

Dalam sambutannya, Kak Na juga mengungkapkan beberapa kasus penyakit jantung pada anak yang disebabkan oleh kebiasan buruk orang tua di rumah, yaitu merokok.

Kepada para peserta yang merupakan perwakilan dari DWP SKPA, Kak Na berpesan untuk mengikuti lomba dengan penuh semangat. Kak Na berjanji, ke depan akan membuat event lomba yang lebih besar, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat provinsi.

"Ke depan bisa dibuat ajang lomba lebih luas, seleksi di tingkat kabupaten dan pemenangnya akan bersaing di tingkat Aceh. Seluruh peserta harus semangat. Tahun lalu, tim Senam Jantung Sehat Aceh berhasil keluar sebagai Juara Pertama pada Lomba Senam Jantung Sehat tingkat nasional di Lombok Nusa Tenggara Barat," ungkap Kak Na menyemangati peserta.

"Meski tidak menang, setidaknya kita semua tetap sehat karena senam ini. Ingat, senamnya jangan hanya saat persiapan dan saat lomba tapi terus rutinlah berolahraga dalam keseharian," imbau Kak Na.

Sebelumnya, Ketua DWP Aceh Fitriani Taufik, dalam sambutannya menjelaskan, Lomba Senam Jantung Sehat seri III ini merupakan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun DWP.

"Untuk menggelar event ini, kita bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia Aceh. Lomba ini bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi sebagai upaya kita menjaga dan mempererat ukhuwah dan memperkuat koordinasi anggota DWP lintas SKPA dan instansi vertikal," kata Fitriani.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

DKP Aceh Dorong Kelompok Perempuan Pesisir Kembangkan Olahan Tiram melalui Gemarikan

Oleh Hamdani · 11 Nov, 20.52 WIB



Tim DKP Aceh bersama masyarakat pesisir mengikuti kegiatan Gemarikan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan di TPI Gampong Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh

ACEH BESAR - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) tidak hanya menjadi kampanye peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga dimanfaatkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh sebagai ruang pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.

Melalui Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Subkor P2HP), DKP Aceh memberikan pelatihan diversifikasi produk olahan berbahan dasar tiram kepada Kelompok Cut Nyak Tiram di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gampong Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (11/11/2026).

Dalam pelatihan tersebut, anggota kelompok mempraktikkan langsung pembuatan dua produk olahan, yakni stik keju tiram dan nugget tiram. Inovasi ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk pangan yang lebih beragam, bernilai tambah, dan memiliki peluang pasar.

Kasubkor P2HP DKP Aceh, Fitriani, S.Pi., M.Si., mengatakan, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga masyarakat pesisir.

"Kami mendorong kelompok masyarakat agar mampu mengolah hasil perikanan menjadi produk yang bernilai tambah, higienis, dan bergizi. Harapannya, masyarakat tidak hanya mengonsumsi ikan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi perikanan di daerahnya," ujar Fitriani.

Menurutnya, pelatihan diversifikasi produk perlu diikuti dengan pengembangan mutu, inovasi, kemasan, dan pemasaran agar produk olahan kelompok dapat berkembang serta memiliki daya saing.

Kelompok Cut Nyak Tiram yang diketuai Syukriah saat ini beranggotakan 15 orang. Kelompok tersebut telah menjalankan produksi olahan tiram secara mandiri dengan memanfaatkan modal kelompok. Namun, pengemasan produk masih sederhana dan pemasaran masih terbatas di pasar lokal.

Melalui pelatihan ini, anggota kelompok memperoleh tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan variasi produk berbahan dasar tiram. Stik keju tiram dan nugget tiram menjadi alternatif olahan yang dapat memperluas pilihan produk sekaligus meningkatkan daya tarik hasil perikanan lokal bagi konsumen.

Ketua Kelompok Cut Nyak Tiram, Syukriah, berharap kegiatan pelatihan dan pendampingan dari DKP Aceh dapat terus berlanjut sehingga usaha kelompok semakin berkembang.

Ia berharap kelompoknya dapat terus maju, meningkatkan produksi, dan memberikan manfaat lebih besar dalam membantu perekonomian keluarga anggotanya.

Pelatihan tersebut dipandu instruktur dari DKP Aceh, yakni Anis, Ani, dan Lia, yang memberikan materi sekaligus praktik pengolahan stik keju tiram dan nugget tiram.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Presiden Batal ke UTU, Aceh Barat Titip Tiga Harapan

Oleh Aceh Barat · 11 Nov, 15.58 WIB



Pemkab Aceh Barat bersama Forkopimda menghadiri Dies Natalis UTU sekaligus menggelar zikir dan doa bersama meski kunjungan Presiden Prabowo ke kampus tersebut ditunda,FOTO/ist

MEULABOH – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) belum mencakup agenda ke Universitas Teuku Umar (UTU), Aceh Barat. Agenda tersebut ditunda akibat perubahan jadwal perjalanan Presiden yang cukup padat.

Berdasarkan informasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dari Menteri Dalam Negeri, Presiden Prabowo mendarat di Bandara Cut Nyak Dhien sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, Presiden langsung menuju Sekolah Rakyat dan Masjid Giok di Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.

Perubahan jadwal keberangkatan dari rencana semula pukul 06.00 WIB di Bandara Halim, Jakarta, menyebabkan waktu kunjungan menjadi terbatas. Jika perjalanan dilanjutkan ke Kampus UTU, Presiden diperkirakan baru kembali ke Jakarta pada malam hari, sementara masih terdapat agenda kenegaraan lainnya yang tidak dapat dibatalkan.

Upaya menggunakan helikopter dari Alun-Alun Nagan Raya menuju UTU juga terkendala kondisi lokasi pendaratan. Helipad di Lapangan Korem Teuku Umar dilaporkan belum memungkinkan digunakan karena kondisi tanah yang labil dan berair. Sementara itu, perjalanan melalui jalur darat dinilai tidak memungkinkan karena jarak tempuh yang cukup jauh.

Meski Presiden belum dapat menghadiri agenda di Kampus UTU, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tetap melaksanakan zikir dan doa bersama di lingkungan kampus tersebut.

Kegiatan itu digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus memanjatkan doa agar Indonesia, khususnya Aceh, senantiasa dijauhkan dari berbagai musibah dan bencana. Doa juga dipanjatkan agar Presiden dan seluruh pemimpin bangsa diberikan kesehatan, kekuatan, serta perlindungan oleh Allah SWT.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga tetap menghadiri peringatan Dies Natalis UTU sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi tersebut.

Di sisi lain, Pemkab Aceh Barat menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah persoalan dan kebutuhan pembangunan di Aceh.

Setidaknya terdapat tiga agenda utama yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah pusat.

Pertama, penyelesaian sejumlah persoalan Aceh, meliputi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), persoalan tanah wakaf Blang Padang, serta pembahasan terkait Bendera Aceh.

Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh Barat, terutama pembangunan Irigasi Lhok Guci, Rumah Sakit Regional, serta peningkatan jalan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Ketiga, dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pengembangan Kampus Universitas Teuku Umar sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemerintah Aceh Pertegas Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi

Oleh Redaksi · 11 Nov, 21.41 WIB



JAKARTA – Pemerintah Aceh kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut disampaikan dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam uji publik bertema "Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik" tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Edi Yandra hadir memaparkan strategi dan pencapaian Pemerintah Aceh mewakili Gubernur Aceh.

Tahapan uji publik ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Evaluasi Monev KIP 2026. Sebelumnya, Pemerintah Aceh berhasil melaju ke tahap ini setelah meraih nilai sempurna (100) pada tahapan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ).

Dalam pemaparannya, Edi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan pilar utama mewujudkan good governance dan meningkatkan kepercayaan publik di Aceh.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Aceh yang inklusif, transparan, dan akuntabel," ujar Edi.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh terus meluncurkan berbagai inovasi digitalisasi layanan publik, mulai dari penguatan portal PPID Utama, penyiapan aplikasi Satu Data Aceh (sesuai Pergub Aceh No. 24/2022), hingga integrasi layanan informasi di tingkat SKPA hingga gampong (desa).

Hingga Oktober 2026, aplikasi PPID Pemerintah Aceh telah menyediakan lebih dari 7.600 dokumen publik yang diunduh lebih dari 950 ribu kali oleh masyarakat. Selain itu, angka Indeks Reformasi Birokrasi Aceh pada tahun 2025 meningkat mencapai 82,73 (Kategori A-) serta mempertahankan predikat WTP dari BPK selama 11 tahun berturut-turut.

Dalam presentasi tersebut, Kadis Kominsa Aceh turut didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLIP) Diskominsa Aceh Safrizal AR, Komisioner Komisi Informasi (KI) Aceh Dian Rahmat Syahputra, serta Fungsional Analis Kebijakan Diskominsa Aceh Surya Ramadhan.

Melalui tahapan Uji Publik ini, Pemerintah Aceh berharap dapat terus mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik "Informatif" serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat Aceh.[]

ACEH

UIN Ar-Raniry Terima Hibah Alat Pengolahan Air dari Yayasan Manarul Ilmi ITS

Oleh Redaksi · 11 Nov, 13.48 WIB



BANDA ACEH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menerima hibah satu unit Mobile Water Treatment Plant (WTP) dari Yayasan Manarul Ilmi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Rabu (11/11/2026).

Penyerahan hibah berlangsung di Aula Lantai III Gedung Rektorat UIN Ar-Raniry. Unit pengolahan air tersebut diserahkan oleh Yayasan Manarul Ilmi ITS bersama Satgas Kemanusiaan ITS dan Ikatan Alumni (IKA) ITS kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg.

Mobile WTP berkapasitas tiga meter kubik per jam itu dirancang untuk mengolah air keruh, seperti air sungai, menjadi lebih jernih melalui proses penjernihan (water clarification).

Sebelum dihibahkan kepada UIN Ar-Raniry, perangkat tersebut telah dioperasikan selama hampir tujuh bulan di Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera pada 2025.

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg mengatakan hibah tersebut menjadi dukungan penting bagi pengembangan pendidikan sains dan teknologi di lingkungan kampus. Fasilitas itu diharapkan dapat memperkuat pembelajaran berbasis praktik, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

Menurut Mujiburrahman, keberadaan Mobile WTP memungkinkan mahasiswa dan dosen mempelajari proses pengolahan air secara langsung sehingga pembelajaran tidak hanya bertumpu pada teori.

"Fasilitas ini diharapkan betul-betul dapat dimanfaatkan, terutama oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan Program Studi Teknik Lingkungan. Mahasiswa dan dosen dapat belajar secara langsung mengenai proses pengolahan air sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoretis," ujar Mujiburrahman.

Ia juga berharap hibah tersebut menjadi awal penguatan kemitraan berkelanjutan antara UIN Ar-Raniry dan Yayasan Manarul Ilmi ITS, terutama dalam pengembangan pengetahuan, pertukaran pengalaman, dan peningkatan kapasitas akademik.

Sementara itu, Managing Director PT Energi Quarto Indonesia sekaligus Direktur Kemitraan Strategis Infaq dan Sadaqah Yayasan Manarul Ilmi ITS, Dr Ir Hamdani Bantasyam menjelaskan hibah tersebut merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam menghadirkan manfaat teknologi bagi masyarakat, termasuk melalui sektor pendidikan.

Hamdani mengatakan Mobile WTP yang diserahkan kepada UIN Ar-Raniry berfungsi menjernihkan air dengan menghilangkan partikel padat tersuspensi (suspended solid) yang menyebabkan air terlihat keruh. Teknologi tersebut berbeda dengan sistem pemurnian air (water purification) yang menghasilkan air siap minum.

"Alat ini nantinya bisa menjadi laboratorium bagi mahasiswa Teknik Lingkungan. Mereka dapat mempelajari bagaimana air yang keruh diproses menjadi jernih melalui teknologi pengolahan air," jelasnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Terima Kunjungan Deputi Pencegahan BNPB, Bahas Penguatan Mitigasi Bencana

Oleh Redaksi · 11 Nov, 14.58 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menerima kunjungan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda Aceh, Rabu (11/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas kondisi kebencanaan terkini di Aceh, khususnya terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satu perhatian utama adalah bencana banjir yang dalam beberapa waktu terakhir kerap melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak turut membahas pentingnya memperkuat langkah mitigasi dan pencegahan bencana sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan. Penanganan bencana, menurut pembahasan tersebut, tidak hanya berfokus pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga harus didukung oleh langkah antisipasi dan kesiapan sejak dini.

Penguatan mitigasi dinilai penting agar pemerintah dan masyarakat memiliki pemahaman serta kesiapan yang memadai dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dengan demikian, langkah penanganan dapat dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan tidak semata-mata bersifat reaktif ketika situasi darurat terjadi.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi kedaruratan serta peluang kerja sama antara Pemerintah Aceh dan BNPB, terutama dalam memperkuat upaya pencegahan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas daerah.

Melalui koordinasi dan kerja sama tersebut, diharapkan upaya penanggulangan bencana di Aceh dapat semakin diperkuat, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat terjadi bencana. Hal ini menjadi penting mengingat Aceh merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk banjir.[]

ACEH

Wagub Aceh Dampingi Prabowo Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat di Nagan Raya

Oleh Redaksi · 11 Nov, 15.34 WIB



NAGAN RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Prabowo tiba di Bandara Cut Nyak Dhien, Kabupaten Nagan Raya, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Masjid Agung Baitul A'la atau yang dikenal dengan Masjid Giok, di Kompleks Perkantoran Suka Makmue, pusat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Dalam perjalanan dari Bandara Cut Nyak Dhien menuju lokasi kegiatan, Prabowo melintas langsung di samping bentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer yang dibentangkan oleh masyarakat setempat. Pembentangan bendera tersebut menjadi pemandangan istimewa sekaligus wujud semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat Nagan Raya terhadap Tanah Air.

Aksi pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer itu juga mencatatkan prestasi dengan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Setibanya di lokasi, Prabowo melanjutkan agenda dengan meresmikan Masjid Giok Baitul A'la serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Nagan Raya.

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih baik, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Sementara itu, peresmian Masjid Giok Baitul A'la menjadi momentum penting dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan.

Kunjungan kerja Presiden tersebut turut didampingi sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Turut hadir Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Kehadiran Wagub Aceh dalam kunjungan kerja tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Aceh terhadap program dan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat di Aceh.[]

ACEH

Bupati Aceh Barat Hadiri Zikir Kebangsaan di UTU, Doakan Presiden Prabowo

Oleh Aceh Barat · 11 Nov, 16.42 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri Zikir Kebangsaan di halaman Kampus UTU, Meureubo, Rabu (11/11/26),FOTO/HA1

MEULABOH– Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH menghadiri Zikir Kebangsaan dan doa bersama di halaman Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Alue Peunyareng, Kecamatan Meureubo, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional 2026 itu turut dihadiri Rektor UTU bersama civitas akademika, para ulama, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para santri.

Bupati Tarmizi mengatakan, zikir dan doa bersama tersebut digelar untuk mendoakan para pahlawan, Presiden RI Prabowo Subianto, serta keselamatan bangsa dan masyarakat Aceh agar terhindar dari bencana.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menyambut rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Kampus UTU. Namun, agenda kunjungan tersebut mengalami penjadwalan ulang karena sejumlah pertimbangan.

"Zikir dan doa bersama ini sebenarnya untuk menyambut kedatangan Presiden. Namun, berdasarkan komunikasi terakhir, jadwal kunjungan beliau bergeser dan akan diagendakan kembali pada waktu lain," kata Tarmizi.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh rencana kunjungan Presiden ke UTU. Karena itu, pihaknya bersama Forkopimda tetap menghadiri zikir kebangsaan sebagai bentuk dukungan sekaligus memberikan semangat kepada seluruh peserta.

Tarmizi berharap Presiden Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari berbagai musibah.[]

Editor : Biro Meulaboh

ACEH

Rita Mayasari: BKMT Harus Jadi Benteng Ketahanan Keluarga

Oleh Redaksi · 11 Nov, 11.45 WIB



ACEH BESAR– Ketua Pembina Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Aceh Besar, Rita Mayasari, mengingatkan pentingnya peran majelis taklim dalam memperkuat ketahanan keluarga, membina generasi muda, serta menjaga nilai-nilai keislaman di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Rita dalam sambutannya pada pengukuhan Pengurus Cabang (PC) BKMT delapan kecamatan untuk sisa masa bakti 2024–2029 di Meuligoe Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (10/11/2026).

Rita menyampaikan kebanggaan dan optimisme atas terbentuknya kepengurusan baru di tingkat kecamatan. Menurutnya, kehadiran wajah-wajah baru membawa energi positif dan semangat baru untuk memperkuat kiprah BKMT dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Ia menegaskan, majelis taklim tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul untuk mendengarkan ceramah, tetapi harus berkembang menjadi pusat edukasi keagamaan yang memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan keluarga.

“Majelis taklim bukan sekadar tempat berkumpul untuk mendengarkan ceramah secara pasif. BKMT harus bertransformasi menjadi pusat edukasi yang memperkokoh ketahanan keluarga. Ibu-ibu pengurus harus menjadi pelopor dalam membimbing generasi muda agar memiliki akidah yang lurus dan akhlakul karimah yang kokoh,” tegas Rita .

Selain pembinaan keluarga, ia juga mengingatkan seluruh pengurus agar menjadikan BKMT sebagai wadah mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat silaturahmi. Menurutnya, perbedaan tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun kebersamaan dan menjalankan program organisasi.

“Jadikan organisasi ini sebagai wadah perekat silaturahmi, bukan tempat memelihara perbedaan. Di dalam kepengurusan, satukan visi dan langkah demi kemaslahatan umat,” pesannya.

Rita menilai kekompakan dan soliditas pengurus menjadi modal penting dalam menjalankan program kerja. Dengan kebersamaan yang kuat, berbagai kegiatan organisasi diharapkan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, ia berharap program kerja BKMT di tingkat kecamatan dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah. Kolaborasi yang sinergis antara ulama, umara atau pemerintah, dan majelis taklim dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat Aceh Besar yang religius, bermartabat, maju, dan sejahtera.

Pada akhir sambutannya, Rita mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus cabang yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.

“Semoga Allah SWT meridai pengukuhan ini serta memberkahi setiap kontribusi dan pengabdian yang diberikan demi syiar Islam di Kabupaten Aceh Besar,” tutupnya.[]

ACEH

Mualem Minta Realisasi APBA dan TKD 2026 Dikebut, Jangan Sampai Dana Dikembalikan ke Pusat

Oleh Redaksi · 11 Nov, 11.40 WIB



BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 serta memastikan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) berjalan maksimal.

Arahan tersebut disampaikan Mualem secara virtual saat mengikuti rapat pimpinan bersama para Kepala SKPA di Ruang P2K APBA, Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).

Mualem menegaskan, seluruh anggaran yang telah dialokasikan harus dikejar realisasinya dan diawasi secara serius. Ia mengingatkan agar tidak ada anggaran yang tersisa hingga akhirnya harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” tegas Mualem.

Ia juga meminta agar sejumlah program hibah, pembangunan masjid, dan dayah dipersiapkan dengan baik, terutama dari sisi regulasi, sehingga pelaksanaannya tidak terkendala aturan.

Mualem secara khusus meminta Staf khususnya Taqwallah terus berkomunikasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Ia turut mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), rumah sakit, serta Badan Dayah agar memastikan program berjalan sesuai sasaran.

“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait dana TKD, Mualem meminta agar pemanfaatannya dioptimalkan, termasuk memperbanyak belanja pembangunan jembatan Bailey yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Ia menyebutkan, kebutuhan jembatan Bailey cukup tinggi di tengah masyarakat sehingga program tersebut perlu mendapat perhatian dalam percepatan belanja daerah.

“Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mualem juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat dicairkan pada 2027.

Permintaan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran bagi Aceh tetap tersedia untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan masyarakat.[]

LINGKUNGAN

3 BERITA

LINGKUNGAN

BNPB Kantongi 3 Nama Perusahaan yang Disorot soal Karhutla Papua, Siapa Saja?

Oleh Van · 11 Nov, 17.42 WIB



Kobaran api besar melahap lereng bukit yang kering sementara warga sekitar berkumpul menyaksikan dampaknya.

JAKARTA — Tiga perusahaan terindikasi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menelusuri sejumlah titik api. Identitas perusahaan tersebut telah dikantongi, tetapi belum diumumkan kepada publik.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan data ketiga perusahaan itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan verifikasi lapangan.

“Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah,” kata Kristomei dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

BNPB Telusuri Tiga Perusahaan Terkait Karhutla Papua

Kristomei menjelaskan, identifikasi bermula dari pemantauan titik panas atau hotspot menggunakan aplikasi BNPB. Penelusuran kemudian dilakukan untuk mengetahui lokasi titik api dan perusahaan yang berada di sekitarnya.

BNPB belum memastikan apakah kebakaran tersebut berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui penyebab munculnya api di lokasi-lokasi tersebut.

Surat permintaan klarifikasi dan verifikasi telah dikirimkan kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengecek kondisi di lapangan.

WALHI Catat 65 Titik Api di Konsesi 11 Perusahaan

Temuan BNPB tersebut menjadi sorotan di tengah data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengenai sebaran titik api di Papua Selatan. Dalam kajiannya, WALHI mencatat 65 titik api berada di dalam konsesi 11 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Tiga perusahaan dengan jumlah titik panas terbanyak dalam catatan tersebut adalah PT Plasma Nutfah Marind Papua dan PT Selaras Inti Semesta, masing-masing 17 titik, serta PT Wanatirta Ediwibowo dengan 12 titik.

Selain itu, WALHI mencatat titik panas di konsesi PT Tunas Sawaerma sebanyak tujuh titik, PT Damai Setiatama Tbr dan PT Sagindo Sari Lestari II masing-masing tiga titik, serta PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II sebanyak dua titik.

Empat perusahaan lainnya masing-masing tercatat memiliki satu titik panas, yakni PT Artika Optima Inti Unit IV, PT Bade Makmur Orissa, PT Merauke Rayon Jaya, dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III.

Perlu dicatat, daftar perusahaan dalam kajian WALHI tersebut tidak otomatis sama dengan tiga perusahaan yang sedang diverifikasi BNPB. BNPB belum membuka identitas tiga perusahaan yang dimaksud, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Karhutla Kalimantan Belum Padam, Papua Kian Membara

Oleh Rut sw · 11 Nov, 16.25 WIB



Sebuah ilustrasi yang menggambarkan pohon berwajah sedih dengan dedaunan berbentuk kata 'SOS'. Pohon ini berdiri di atas bukit kecil dengan latar belakang gedung-gedung kota yang

ERTANYAAN besar hari ini, “ Negara Kemana?”. Dari data yang dicatat BNPB terdapat lonjakan kasus karhutla secara keseluruhan yang telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan menambahkan ada peningkatan 66 persen titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan.

Sedihnya, kini wilayah subur yang menjadi habitat asli bagi walabi lincah, burung cendrawasih, dan musamus (sarang rayap raksasa setinggi manusia buatan serangga lokal) menjadi sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik.

Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober.

Terutama di Merauke, seperti di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga hampir separuh titik api belum padam.

Selain itu, wilayah Okaba turut menjadi perhatian BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.

Kemudian, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.

Sungguh, betapa kezaliman ini akan menjadi saksi di akhirat kelak, terlebih ketika peran negara dipertanyakan.

Akar Masalah Adanya Penerapan Sistem Kapitalisme

Berbulan-bulan rakyat di Kalimantan tak lagi bisa melihat birunya langit karena asap hasil pembakaran hutan dan lahan yang lambat ditangani, nyawa sukarelawan dan anak-anak sudah tak lagi bisa diitung, ternyata karhutla Papua lebih mengerikan, semakin membongkar wajah bopeng sistem kepemimpinan sekuler kapitalis yang rakus dan jahat.

Hak rakyat terus diabaikan, bahkan selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat sendiri.

Pemakluman ini dalam segala bidang, siapa sebenarnya yang wajib melayani, negara atau rakyat?

Dalam kasus kebakaran ini, jelas masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut.

Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan, serta minimnya peralatan.

Lisan penguasa terus merajut kebohongan demi kebohongan hanya untuk menutupi kepentingan oligarki yang bermain di dalamnya.

Padahal Rasûlullâh SAW bersabda:

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Mualem Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana hingga Januari 2027

Oleh Redaksi · 11 Nov, 17.35 WIB



Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau kerap disapa Mualem mengenakan rompi krem dengan lencana instansi, sedang berbicara melalui mikropon hitam. Ia menetapkan status siaga darurat bencana. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026, terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Penetapan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, menyusul perkembangan kondisi cuaca serta potensi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.

Kebijakan itu mempertimbangkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera, serta surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.

Melalui penetapan status tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.

Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing.

Selain itu, koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana,
kementerian/lembaga, serta seluruh pihak terkait juga diminta untuk terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Gubernur turut menginstruksikan seluruh SKPA untuk menyiagakan personel agar dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana. Kesiapan sumber daya manusia dinilai penting untuk mendukung langkah penanganan di lapangan, terutama pada wilayah yang berpotensi terdampak.

Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Aceh mengharapkan seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan,
memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama masa siaga darurat berlangsung.

Penetapan status ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mengantisipasi risiko bencana dan memastikan respons penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi keadaan darurat.***

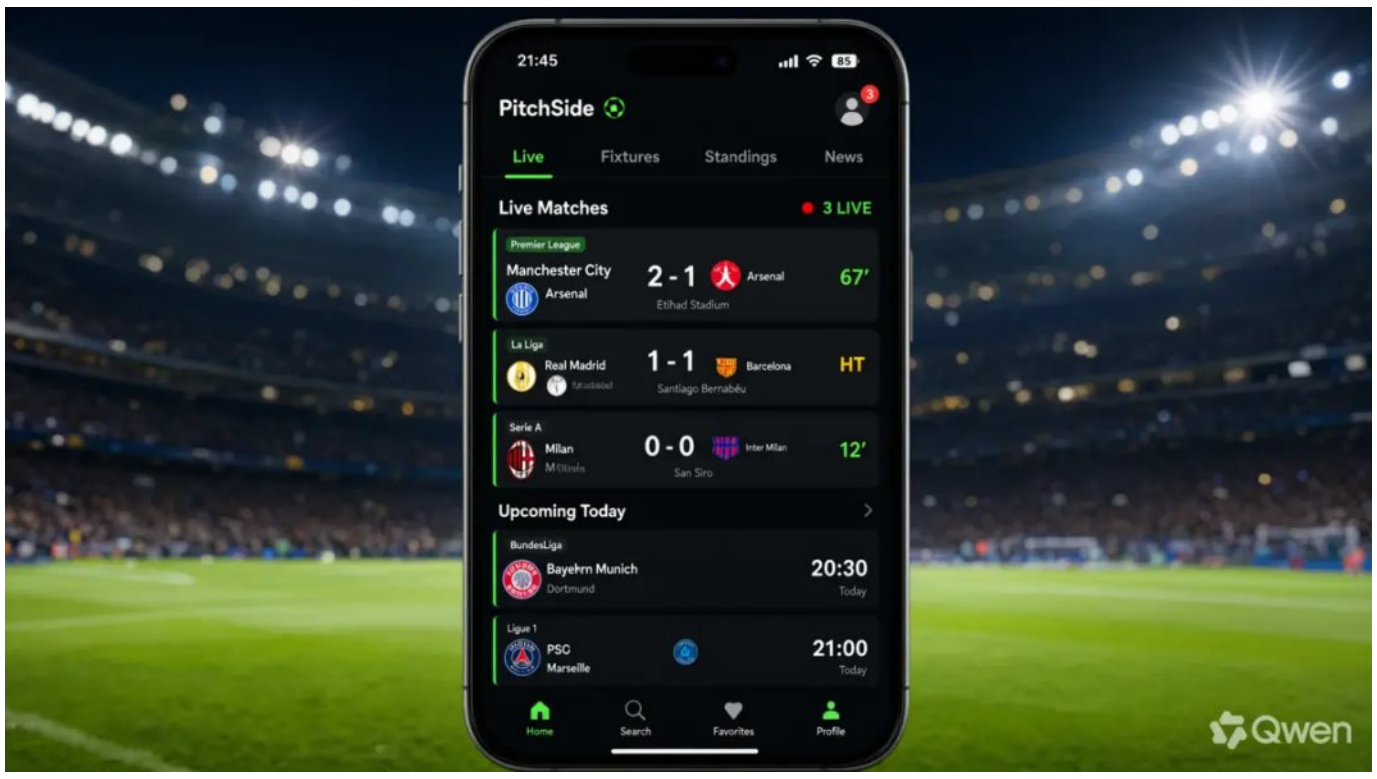
ANEKA BERITA

6 BERITA

SPORT

Rekomendasi Aplikasi Jadwal Bola Terbaik untuk Penggemar Sepak Bola

Oleh Redaksi · 11 Nov, 17.39 WIB



Sebuah ponsel cerdas menampilkan aplikasi 'PitchSide' dengan daftar skor pertandingan sepak bola langsung dan jadwal mendatang di atas latar belakang stadion yang buram. Aplikasi ini menunjukkan skor real-time untuk liga besar seperti Premier League, La Liga, dan Serie A. FOTO/AI for HAI.

BANDA ACEH - Penggemar sepak bola bisa menggunakan aplikasi jadwal bola untuk mengetahui waktu pertandingan, memantau kompetisi favorit, hingga mendapatkan notifikasi ketika klub kesayangan akan bermain.

Beberapa aplikasi bahkan menyediakan skor langsung, statistik, klasemen, dan informasi susunan pemain.

Pilihan aplikasinya cukup beragam, mulai dari Sofascore, Flashscore, FotMob, OneFootball, hingga LiveScore.

Setiap platform memiliki keunggulan berbeda, sehingga kamu bisa memilih layanan yang paling sesuai dengan kebiasaan mengikuti pertandingan.

Tidak perlu membuka banyak situs untuk sekadar mencari tahu pertandingan apa yang berlangsung malam ini.

Berikut rekomendasi aplikasi yang layak dipertimbangkan oleh penggemar sepak bola.

Mengapa Penggemar Sepak Bola Membutuhkan Aplikasi Jadwal Bola?

Jadwal pertandingan sepak bola tersebar di berbagai kompetisi dan negara.

Dalam satu hari, bisa ada puluhan pertandingan dari liga domestik, kompetisi antarklub Eropa, hingga pertandingan internasional.

Situasi tersebut membuat penggemar sepak bola membutuhkan sumber informasi yang praktis.

Aplikasi jadwal bola membantu mengumpulkan informasi pertandingan dalam satu tempat sehingga pengguna tidak harus mencari jadwal secara manual.

Selain menampilkan tanggal dan waktu kick-off, sejumlah aplikasi juga menyediakan informasi tambahan yang berguna sebelum dan selama pertandingan berlangsung.

1. Mengetahui jadwal pertandingan dari berbagai liga

Salah satu fungsi utama aplikasi sepak bola adalah menampilkan agenda pertandingan dari berbagai kompetisi.

Kamu bisa mencari pertandingan dari kompetisi populer seperti:

- Premier League Inggris.
- La Liga Spanyol.
- Serie A Italia.
- Bundesliga Jerman.
- Ligue 1 Prancis.a
- UEFA Champions League.
- UEFA Europa League.
- Piala Dunia.
- BRI Super League Indonesia.

Ketersediaan kompetisi bisa berbeda pada setiap aplikasi. Karena itu, pastikan platform yang dipilih memiliki cakupan liga yang ingin kamu ikuti.

2. Mendapatkan notifikasi sebelum pertandingan dimulai

Fitur notifikasi menjadi salah satu alasan banyak penggemar menggunakan aplikasi sepak bola.

Kamu bisa mengikuti klub favorit dan mengaktifkan pemberitahuan pertandingan. Beberapa aplikasi juga memungkinkan pengguna menerima notifikasi ketika terjadi gol, kartu merah, pergantian pemain, atau pertandingan berakhir.

Dengan begitu, kamu tidak harus terus-menerus membuka aplikasi untuk memeriksa perkembangan pertandingan.

3. Memantau skor dan statistik pertandingan

Aplikasi sepak bola modern tidak hanya menampilkan jadwal. Beberapa di antaranya menyediakan informasi statistik seperti penguasaan bola, jumlah tembakan, peluang, susunan pemain, hingga expected goals (xG).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Peukan Bada Terima 171 Mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Abulyatama untuk Laksanakan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Gerontik

Oleh Hamdani · 11 Nov, 21.02 WIB



Sebanyak 171 mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Abulyatama (Unaya) yang akan melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Gerontik di wilayah tersebut, Rabu 11

KOTA JANTHO - Kecamatan Peukan Bada menerima sebanyak 171 mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Abulyatama (Unaya) yang akan melaksanakan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Gerontik di wilayah tersebut, Rabu 11 November 2026 di Aula UDKP Kecamatan Peukan Bada.

Camat Peukan Bada, Salamuddin ZM SE dalam sambutannya menyambut baik baik program Praktik Klinik D3 Keperawatan Unaya yang ditempatkan di gampong-gampong Kecamatan Peukan Bada.

"Kehadiran mahasiswa di gampong-gampong diharapkan dapat membantu warga dalam layanan kesehatan dan memberikan pengetahuan mengenai berbagai hal terkait kesehatan, "tambahnya.

Selain itu Salamuddin juga mengharapkan dengan program praktik klinik ini sebagai bagian silaturahmi mahasiswa D3 Keperawatan Unaya dengan warga Kecamatan Peukan Bada.

Sementara itu Ketua Prodi D3 Keperawatan Unaya, Ns. Urip Pratama, M.Kep mengatakan kegiatan praktik klinik ini merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa keperawatan untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada keluarga dan kelompok lanjut usia (lansia).

"Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan pengkajian kesehatan keluarga, mengidentifikasi permasalahan kesehatan masyarakat, memberikan edukasi kesehatan, serta melaksanakan asuhan keperawatan secara langsung di tengah masyarakat, "tambahnya.

"Kehadiran 171 mahasiswa tersebut dari 9 November sampai dengan 8 Desember 2026 juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kecamatan Peukan Bada, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan keluarga dan memperhatikan kesejahteraan para lansia, "harapnya.

"Praktik klinik ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara institusi pendidikan tinggi dengan pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, "ujarnya.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Universitas Abulyatama tidak hanya memperoleh pengalaman praktik lapangan, tetapi juga mampu menumbuhkan kepedulian sosial dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan keluarga dan gerontik di tengah masyarakat, "tutupnya.[*]

EDUKASI

Advokat Minta Hakim Adil dalam Kasus Dana BOS SMAN 9 Banda Aceh

Oleh Redaksi · 11 Nov, 18.06 WIB



Momen kebersamaan tim hukum di dalam ruang persidangan yang khidmat.

BANDA ACEH – Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri 9 Banda Aceh kini memasuki fase pembuktian. Di tengah proses hukum tersebut, tim advokat melalui Justice Delicty meminta majelis hakim mengedepankan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjerat JM, bendahara Dana BOS sekolah tersebut.

Harapan itu muncul ketika seluruh fakta hukum mulai diuji di ruang persidangan. Pihak pembela menginginkan agar nasib hukum JM ditentukan berdasarkan kekuatan alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum yang terungkap selama persidangan.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran Dana BOS SMAN 9 Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian setelah Kejaksaan Negeri Banda Aceh menaikkan penanganannya dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dalam pengungkapan awal perkara, Kejari Banda Aceh mengungkap adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran pendidikan tersebut. Penyidik juga telah meminta keterangan puluhan orang yang sebagian besar berasal dari lingkungan internal sekolah guna mendalami dugaan penyimpangan yang terjadi.

Seiring perkembangan penanganan perkara, proses hukum kini berlanjut ke meja hijau dengan agenda pembuktian. Tahapan ini menjadi momentum penting bagi jaksa penuntut umum maupun pihak pembela untuk menguji setiap bukti dan menyampaikan argumentasi masing-masing di hadapan majelis hakim.

Tim advokat yang mendampingi JM berharap jalannya persidangan berlangsung secara objektif, terbuka, dan tidak keluar dari koridor hukum. Mereka menilai setiap proses pemeriksaan harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh pihak untuk mengemukakan fakta dan pembelaannya.

Selain itu, majelis hakim diharapkan tidak mengabaikan satu pun fakta yang muncul selama persidangan. Keterangan para saksi, dokumen pendukung, alat bukti, hingga argumentasi pembelaan dinilai harus diperiksa secara menyeluruh sebelum keputusan hukum diambil.

Bagi tim pembela, putusan terhadap JM harus lahir dari proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian terhadap terdakwa, menurut harapan mereka, tidak boleh dibangun hanya dari dugaan, persepsi, maupun opini publik yang berkembang di luar ruang sidang.

Praduga Tak Bersalah Harus Tetap Dihormati

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya hak-hak setiap orang yang menjalani proses peradilan. Keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LIFESTYLE

Pacaran dengan AI Bikin Gangguan Jiwa? Psikiater Ungkap Kondisi yang Perlu Diwaspadai!

Oleh Van · 11 Nov, 17.24 WIB



Menemukan koneksi di era digital. Apakah cinta dengan AI adalah masa depan kita?

JAKARTA — Fenomena pacaran dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ramai diperbincangkan setelah muncul cerita warganet yang menjalin hubungan emosional dengan chatbot.

Interaksi tersebut bahkan digambarkan berlangsung intens, mulai dari percakapan romantis hingga melakukan panggilan suara dalam waktu lama.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai batas hubungan manusia dengan teknologi dan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan mental.

Pacaran dengan AI, Apakah Termasuk Gangguan Jiwa?

Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk dicintai, didengarkan, dipahami, dan diterima oleh orang lain.

Chatbot AI dapat memberikan respons cepat, perhatian, serta komunikasi yang terasa personal. Kondisi tersebut berpotensi membuat pengguna merasa memiliki hubungan emosional dengan teknologi.

Namun, menjalin hubungan romantis dengan AI tidak otomatis menunjukkan seseorang mengalami gangguan jiwa.

Istilah AI-induced psychosis atau psikosis yang dikaitkan dengan penggunaan AI mulai menjadi perhatian dalam diskusi kesehatan mental, meski belum diakui sebagai diagnosis klinis resmi.

Psikosis merupakan kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan membedakan kenyataan dengan sesuatu yang tidak nyata, termasuk melalui halusinasi atau waham.

Dalam penelitian yang dipublikasikan Stanford pada 20 April 2026, peneliti menganalisis 19 transkrip percakapan manusia dengan chatbot.

Penelitian tersebut menemukan pola interaksi ketika chatbot justru menguatkan keyakinan keliru pengguna melalui respons yang terus membenarkan dan memberikan validasi.

Ketergantungan AI Bisa Memengaruhi Kesehatan Mental

Kementerian Kesehatan RI sebelumnya juga mengingatkan risiko penggunaan AI untuk menilai kondisi kesehatan mental secara mandiri.

Psikiater FKUI-RSCM, dr. Kristiana Siste, mengatakan AI dapat memberikan hasil yang keliru atau berlebihan sehingga tidak boleh dijadikan dasar diagnosis.

“AI bagus jika digunakan bersama-sama oleh keluarga. Orang tua harus mengerti dulu lalu mengajak anaknya berinteraksi bersama,” ujarnya dalam Dialog Multistakeholder Towards a Smart Governance pada Rabu, 26 November 2025.

Ketergantungan berlebihan terhadap chatbot juga berpotensi membuat seseorang menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa lebih dipahami oleh AI.

WHO dalam publikasinya pada 20 Maret 2026 turut menyoroti penggunaan AI generatif untuk dukungan emosional, terutama di kalangan anak muda.

WHO merekomendasikan agar dampak AI terhadap kesehatan mental, termasuk ketergantungan emosional, menjadi bagian dari penilaian dan pemantauan teknologi tersebut.

Karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti hubungan sosial maupun tenaga profesional kesehatan mental.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

KPK Didesak Periksa Raffi Ahmad Buntut Viral Dana APBN untuk Influencer

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Gerakan Muda (Gema) Nasional Eko Saputra mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan pemanfaatan anggaran negara (APBN) untuk sewa influencer.

Eko menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Setiap dugaan penggunaan uang negara untuk membiayai aktivitas influencer, kepentingan pencitraan, maupun kegiatan komunikasi yang tidak jelas pertanggungjawabannya harus diperiksa secara objektif dan menyeluruh.

"Kami tidak ingin uang rakyat dijadikan alat untuk membangun popularitas, membungkam kritik, atau menggiring opini publik demi kepentingan kelompok tertentu. APBN adalah uang rakyat yang penggunaannya wajib transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Menurutnya, KPK harus memastikan apakah terdapat aliran dana APBN yang berkaitan dengan aktivitas influencer, siapa pihak yang mengelola anggaran tersebut, bagaimana mekanisme penggunaannya, serta siapa saja yang menerima manfaat dari kegiatan tersebut.

Gema Nasional meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada persoalan administratif semata. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

"Jangan sampai masyarakat disuguhi berbagai narasi pencitraan, sementara penggunaan uang negara justru tidak transparan. Kami meminta KPK bekerja secara profesional, independen, dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan maupun popularitas seseorang," lanjutnya.

Eko menambahkan bahwa jabatan, popularitas, dan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum.

"KPK harus membuktikan bahwa hukum masih memiliki keberanian untuk menyentuh siapapun. Jangan sampai hukum terlihat garang kepada rakyat kecil, tetapi kehilangan taring ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan," ungkap dia.

Ia menegaskan, Gema Nasional akan terus mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan APBN dan meminta seluruh lembaga negara menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.

"Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami sedang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan penyimpangan, jangan ada kompromi. Uang negara adalah milik rakyat, bukan milik segelintir orang!" tandasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah akan terlebih dahulu melihat apakah temuan ICW tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

RANS Akui Terima Kontrak Influencer dari Dua Kementerian

Oleh Redaksi · 11 Nov, 08.38 WIB



BANDA ACEH - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) buka suara soal temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp14,69 miliar.

Dalam keterangannya, RANS mengakui bahwa seluruh kerja sama yang melibatkan perseroan dan anak usaha PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad, dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian pernyataan RANS dalam keterbukaan informasi Selasa malam, 10 November 2026.

Perseroan menyebut proses pengadaan tersebut dilakukan melalui platform Inaproc.id maupun e-katalog yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

“Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel,” tambah perseroan.

RANS menjelaskan, kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan bertujuan mempromosikan museum-museum di Indonesia melalui konten kreatif dan interaktif untuk meningkatkan kunjungan masyarakat.

Sementara bersama KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten edukasi mengenai pengembangan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai salah satu penopang perekonomian nasional.

Dalam kerja sama tersebut, RANS juga mengakui menggandeng The Dudas-1 yang terdiri dari Deddy Mahendra Desta, Ariel Noah, Gading Marten dan Raffi Ahmad untuk mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring.

“RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna,” jelasnya.

Akui Nilai Kontrak Rp14,69 Miliar, Diklaim Raup 52,6 Juta Views

Terkait nilai kerja sama, RANS juga mengakui total kontrak dari empat kampanye bersama kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,69 miliar.

Nilai tersebut terdiri dari satu kampanye bersama Kementerian Kebudayaan sebesar Rp3,9 miliar dan tiga kampanye bersama KKP senilai Rp10,79 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin